

The logo is a shield-shaped emblem with a blue background and a yellow border. At the top, a yellow banner contains the text 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA' in red. Below this is a yellow gear with eight spokes. In the center of the gear is a yellow five-petaled flower. A white banner with green floral patterns curves around the bottom of the gear. At the very bottom, a yellow banner contains the year '1950' in red. The text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT' is centered above the gear.

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP ) TAHUN 2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax  
e\_mail: polppjaya2020@gmail.com  
KUALA TUNGKAL

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan menggambarkan dan menginformasikan capaian kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal,                      Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 19650619 198512 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	3
1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia.....	14
1.5 Isu Strategis.....	14
1.6 Landasan Hukum .....	15
1.7 Sistematika .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	24
2.4 Program untuk pencapaian sasaran .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	35
3.4 Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Halaman

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Lampiran 2. Cascading Tahun 2022

Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Lampiran 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Lampiran 5. Perubahan Perbup IKU

Lampiran 7. Rekap LPPK Desember 2022



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PNS berdasarkan jenis kelamin .....	14
Tabel 2. Keadaan PNS berdasarkan usia .....	14
Tabel 3. Keadaan PNS berdasarkan tingkat pendidikan.....	14
Tabel 4. Jumlah pegawai tidak tetap / petugas keamanan .....	14
Tabel 5. Tujuan dan sasaran, indicator dan target kinerja .....	17
Tabel 6. Strategi dan kebijakan Satpol PP .....	18
Tabel 7. Sasaran strategis terhadap indicator kinerja utama.....	19
Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SatPol PP Tahun 2022.....	20
Tabel 9. Rencana Kerja Tahun 2022.....	21
Tabel 10. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	24
Tabel 11. Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2022.....	25
Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	26
Tabel 13. Realisasi capaian sasaran meningkatnyaTrantibum .....	27
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	27
Tabel 15. Rekapitulasi hasil Operasi Tahun 2022 .....	28
Tabel 16. Data Pelanggaran Perda Tahun 2021 .....	32
Tabel 17. Data Pelanggaran Perda Tahun 2022.....	32
Tabel 18. Responden IKM SatPol PP Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Tabel 19. Responden IKM SatPol PP Berdasarkan Pendidikan.....	36
Tabel 20. Responden IKM SatPol PP Berdasarkan Pekerjaan .....	36
Tabel 21. Evaluasi unsur IKM SatPol PP .....	36
Tabel 22. IKM SatPol PP .....	37
Tabel 23. Pengolahahn Data survey Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Unsur Pelayanan	38
Tabel 24. Realisasi anggaran Tahun 2022 .....	40

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan bagian Perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan kepala SKPD menyusun laporan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja selambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, selain itu juga sebagai upaya berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

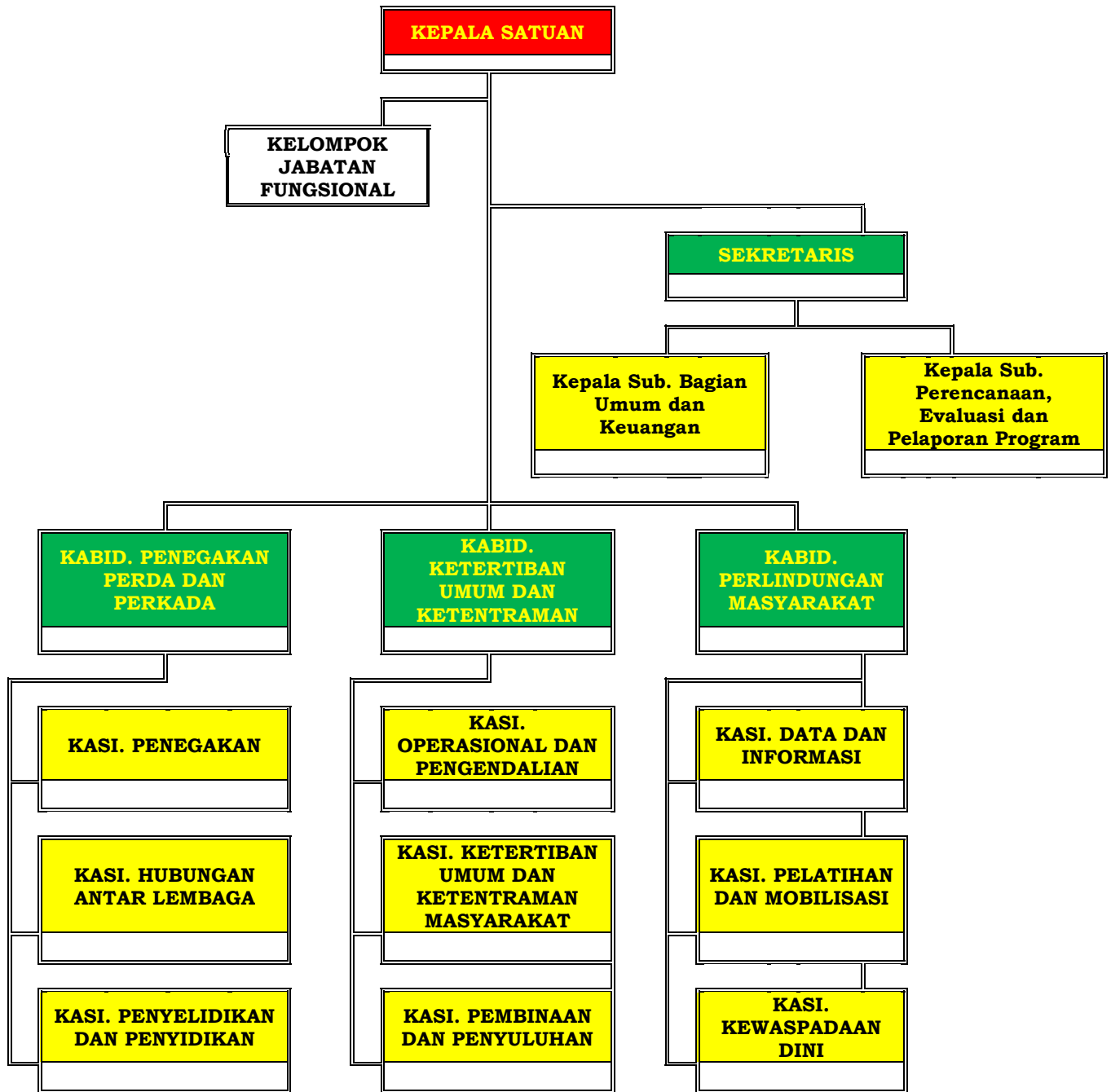
Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur lainnya;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Adapun Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Satuan :**

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Sub Bagian Umum dan Keuangan:**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan Penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tidak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan menyusun laporan asset satuan;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik Kabupaten, Provinsi dan pusat secara lintas program;

- f. Melakukan penyusunan laporan kinerja(LKjIP), rencana strategis (Resntra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

#### **5. Bidang Penegakan Perda dan Perkada**

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengawasan perda kabupaten;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Penegakan**

Seksi penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
- c. Melaksanakan penegakan perda dan perkada;
- d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perka; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **7. Seksi Hubungan Antar Lembaga**



Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
- c. Melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
- d. Melaksanakan analisis dan kajian terhadap penegakan perda dan perkada yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisis, pelaksanaan penegakan perda an perkada; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
- c. Melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindkan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan Kepolisian;
- f. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- g. Melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengamanan dan patroli. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. Penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **10. Seksi Operasi dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- c. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
- d. Melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
- f. Melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- g. Melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas;

- h. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **11. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi patroli wilayah;
- d. Melakukan koordinasi pengawasan aset;
- e. Menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan aset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

### **12. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;

- d. melakukan pembinaan internal personil;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **13. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serta penyebarluasan program informasi perlindungan HAM;
- b. Menyusun program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **14. Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
- d. Melakukan pendataan daerah rawan konflik;
- e. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- g. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat;

#### **15. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah. Seksi ini mempunyai fungsi

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- f. Melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;

- g. Melakukan pembinaan dan pengarahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. Melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi;

## **16. Seksi Kewaspadaan Dini**

Melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran seksi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengarahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- c. Melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi tibulnya bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia;
- f. Melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- h. Mengumpulkan, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
- i. Melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini

## **D. Keragaman Sumber Daya Manusia**

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2022 terdapat PNS yang berjumlah 28 orang dan Non PNS berjumlah 262 orang, dari sejumlah PNS tersebut terdapat 2 (dua) orang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung jabung Barat berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. PNS berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Tahun 2022	Ket
1.	Laki-Laki	24	
2.	Perempuan	4	
Jumlah		28	

**Tabel 2. Keadaan PNS berdasarkan Usia**

No	Usia	Tahun 2022	Ket
1.	26-35	1	
2.	36-45	17	
3.	46-56	7	
4.	> 56	3	
Jumlah		28	

**Tabel 3. Keadaan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Usia	Tahun 2022	Ket
1.	Pasca Sarjana	1	
2.	Sarjana	14	
3.	Diploma	2	
4.	SMA	10	
5.	SMP	1	
Jumlah		28	

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap/ Petugas Keamanan**

No	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tenaga Pengendali Keamanan	231	29
2	Petugas Kebersihan		1
3	Penjaga Kantor	1	
Total		232	30

## E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Penertiban belum berjalan secara optimal dengan akibat Penolakan dari masyarakat;
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan;

3. Belum maksimalnya penyelesaian pelanggaran perda PKL sehingga menjamurnya ruang publik;
4. Tingkat Pelanggaran Hukum pada masyarakat masih rendah dan Lemahnya penyelesaian pelanggaran perda/ perkara
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman aturan;
6. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.

#### **F. Landasan Hukum**

LKjIP ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

#### **G. Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV. PENUTUP**



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Selanjutnya visi dan misi pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan tentang keadaan masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat serta Visi tersebut mengandung makna bahwa Kab.Tanjung Jabung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu : **“Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”.**

#### 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung jabung Barat termasuk kedalam misi ke dua yaitu “Mewujudkan kondisi social yang aman, tertib dan demokratis”

Sedangkan Misi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu dan analisa strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

**Tabel 5. Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, Terbentuknya karakter dan disiplin Anggpta Satpol PP yang Profesional.	Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	20%	20 %	15%	15%	15%

	Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada.							
2	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Nilai AKIP OPD	65,15 Mutu pelayanan  60,44  (B) Kategori	65,30 Mutu pelayanan  60,44  (B) Kategori	65,45 Mutu pelayanan  60,44  (B) Kategori	65,55 Mutu pelayanan  60,44  (B) Kategori	70.00 Mutu pelayanan  60,44  (B) Kategori

#### 4. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI ke-1</b> : Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;				
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku
<b>MISI ke- 2</b> : Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional;				

2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas TRANTIBUM, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	Giat melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja
<b>MISI ke- 3</b> : Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, Pengendalian dan Kenyamanan;				
3.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 7. Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja Utama**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan Terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang professional.	1. Cakupan layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ( Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan); 2. Tingkat pelanggaran peraturan perundang -undangan dan norma yang berlaku (Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup); 3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja;
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP;

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan serta 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan yaitu :

**Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SatPol PP Tahun 2022**

<p><b>PROGRAM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> </ol> <p><b>KEGIATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</li> <li><b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.</li> <li><b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.</li> <li><b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> <li><b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</li> <li><b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> <li><b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li><b>8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota Sub Kegiatan: Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan :Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> </ol>
---

**9. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota**

Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota

Sub Kegiatan : Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**B. Rencana Kerja Tahun 2022**

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 9. Rencana Kerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	298
3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2

4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60
4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8
4.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6
4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1
4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5
5.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2
5.3.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4
5.4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15
5.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
6.4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	11



	Dinas Jabatan			
6.5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3
6.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	16
6.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	Kasus	50
1.2.	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dokumen	1
1.3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1
1.4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
1.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	44
1.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1



1.7.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	8
1.8.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			
2.1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan H Pelaksanaan Sosialisasi Penega Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelom Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1
2.2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	1
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>			
3.1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang disusun mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pablik, Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Sakip	B
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80 %

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran di Tahun 2022, Pada Perjanjian Kinerja di atas dapat dilihat bahwa target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui 2 (dua) program yang dilaksanakan adalah Predikat Nilai SAKIP B serta pencapaian persentase Perda dan Perkada yang berhasil ditegakkan sebesar 80 %.

Predikat SAKIP pada tahun sebelumnya di Tahun 2021 mendapat nilai 60,22 dengan predikat B, sedangkan pada Tahun 2022 belum diketahui karena belum adanya penilaian dan evaluasi SAKIP. Sedangkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan pada Tahun 2022 adalah sebesar 100 % melebihi dari target pada perjanjian kinerja yang ditetapkan sebesar 80 %..

#### **D. Program untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 2022 terdapat 2 (dua) program yang terdiri atas 24 Subkegiatan, Adapun program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Didukung Jumlah Kegiatan</b>
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan Terbentuknya karakter dan disiplin anggota satpol pp yang profesional.	2 kegiatan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	9 kegiatan

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program dan kegiatan serta sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75,00 - 89,99	Tinggi/ Baik	
3	65,00 - 74,99	Sedang/ Cukup	
4	50,00 - 64,99	Rendah/ Kurang	
5	0 - 49,99	Sangat Kurang	

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 13. Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No	Program	Sasaran Kinerja	IKU OPD	Formulasi	REALISASI		TAHUN 2022		Target Akhir RPJMD 2026
					2020	2021	Target	Realisasi %	
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. (Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan);	Jumlah Warga Negara Yang Mendapat Layanan x 100 % Jumlah Warga Negara Yang Berhak Mendapat Layanan	100%	100%	100 %	100%	100%
			2. Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup ( Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan );	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan x 100 % Jumlah Pelanggaran yang diadakan	84%	100%	83 %	100 %	90%

**Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ( Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan )	100 %	40 %	374 kali Patroli
				68 %	647 kali Pengamanan, Pengawasan serta 40 Penertiban
				100%	2.071 Petugas Linmas
		2. Tingkat Pelanggaran Perda dan Perbup (Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan )	83,65 %	100 %	83 Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan

**Tabel 15. Rekapitulasi Hasil Operasi Tahun 2022**

No	Tindakan	Jumlah				Total	Tindak Lanjut	
		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV		Peringatan	Denda
1.	Prostitusi dan Perbuatan Asusila	3	-	-	12	15	15	-
2.	Pedagang kaki lima	-	-	13	12	25	25	-
3.	Pengguna Zat Adiktif ( Lem )	-	-	4	-	4	4	-
4.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	3	5	5	3	16	16	-
5.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	-	-	1	1	2	2	-
6.	Protokol Kesehatan Covid-19	21	-	-	-	21	21	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>-</b>

**1. Uraian tentang Capaian terhadap Target :**

Dapat dijelaskan bahwa sesuai capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk sasaran Kinerja Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat dengan indikator Kinerja Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi antara lain :

- a. Patroli sebanyak 61 kali pada kegiatan Triwulan IV, (Jumlah Triwulan I sebanyak 78 kali Patroli dan Triwulan II sebanyak 130 kali Patroli serta Triwulan III sebanyak 105 kali Patroli);
- b. Pengamanan serta Pengawalan sebanyak 181 kali pada kegiatan Triwulan IV ( Jumlah Triwulan I sebanyak 171 kali Pengamanan, Triwulan II sebanyak 158 kali Pengamanan serta Triwulan III sebanyak 137 kali Pengamanan);
- c. Penertiban sebanyak 3 kali pada kegiatan Triwulan IV (Jumlah Triwulan I sebanyak 33 kali Penertiban, Triwulan II sebanyak 2 kali Penertiban serta Triwulan III sebanyak 2 kali Penertiban)
- d. Kasus Pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 28 Kasus pada kegiatan Triwulan IV, (Jumlah Triwulan I sebanyak 27 Kasus Pelanggaran, Triwulan II sebanyak 5 Kasus Pelanggaran serta dan Triwulan III sebanyak 23 Kasus Pelanggaran).

**2. Permasalahan :**

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan dikarenakan belum meratanya langkah Sosialisasi terhadap Perda yang dilakukan di tingkat Masyarakat Luas.

- b. Penertiban PKL belum berjalan secara optimal dan tidak merata di setiap wilayah sehingga kurangnya analisa lapangan kepada masyarakat dalam menentukan Kebijakan Operasional.
- c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman atau pendatang terhadap penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai pemicu terganggunya Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kab. Tanjung Jabung Barat.
- d. Kurang pemahamannya tentang Perda sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP akibatnya Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan.
- e. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk melayani jumlah penduduk Kab.Tanjung Jabung Barat.
- f. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana, kendaraan operasional angkutan personil.
- g. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.

### **3. Alternatif Pemecahan Masalah/ Solusi :**

Adapun strategis kegiatan dalam pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Razia/Pengawasan dan Pengendalian Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- b. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.
- c. Menindak tegas masyarakat yang dengan nyata telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Melakukan pembinaan kepada anak-anak pemakai Zat Aditif /Lem dengan cara pengamanan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- e. Melaksanakan penertiban penyakit orang gila dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan/kursus (Diklat) serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas.

- g. Menggunakan dana secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan dana yang tersedia secara maksimal.

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan diatas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun dirasakan belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 maka terdapat Perubahan IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman	$IK = \frac{-\text{Persentase penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Jumlah Pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\%$

Bila dilihat dari indikator kinerja utama diatas maka hasil indeks ketentraman dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Indeks Ketentraman} = IK = \frac{-83 \text{ Kasus}}{83 \text{ Kasus}} \times 100\% = 100\%$$

Selanjutnya target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sehingga berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 telah tercapai 100%. Pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 100%, berarti keberhasilan sesuai target yang direncanakan sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
3. Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada;
4. Menurunnya kasus pandemic covid 19 pada Tahun 2022 dan
5. Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian target IKU Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 ini seimbang dengan capaian pada tahun 2021 rata-rata 100% terhadap Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan anggota intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Tahun 2022 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan :

- a. Realisasi kinerja sehingga Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 telah tercapai 100%;
- b. Pelanggaran Perda Tahun 2022 sebanyak 83 kasus lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 937 kasus, hal ini disebabkan terutama sekali karena sudah menurunnya pandemic covid 19 pada tahun 2022. Dimana pelanggaran Perda terbanyak adalah ketika Pandemi Covid 19 terkait protocol kesehatan. Selain itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan Perda yang dilaksanakan, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup;
- c. Keberhasilan terhadap capaian kinerja didukung oleh berbagai faktor yaitu :
  - Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
  - Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup / aturan yang ada; dan
  - Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - Menurunnya pandemic covid 19 di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengamanan, penertiban dan penyelesaian pelanggaran.

**TABEL 16. DATA PELANGGARAN PERDA TAHUN 2021**

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Protokol Kesehatan Covid-19	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.	861
2.	Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis	Perda Nomor 08 Tahun 2021 - Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis	10



3.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Perda No. 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	6
4.	Gelandangan	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (15) Jo Pasal 21	31
5.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	29
JUMLAH			<b>937</b>

**TABEL 17. DATA PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022**

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Pedagang kaki Lima	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005.	25
2.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	2
3.	Protokol Kesehatan Covid-19	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.	21
4.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Perda No. 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	15
5.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	16
6.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	4
<b>JUMLAH</b>			<b>83</b>

Pada Tabel diatas terlihat jumlah Pelanggaran Perda di Tahun 2021 dan Tahun 2022. Terjadi Penurunan jumlah Pelanggaran Perda yang sangat signifikan di Tahun 2022. Pada Tahun 2021 pelanggaran Perda berjumlah 937 kasus sedangkan pada Tahun 2022 berjumlah 83 kasus. Dari data tersebut diketahui bahwa pelanggaran Perda terbanyak adalah terkait Protokol kesehatan Covid 19. Seiring dengan menurunnya Pandemi covid pada Tahun 2022 maka jumlah pelanggaran Perda juga semakin menurun.

Dari semua sasaran telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, penertiban serta melakukan patroli lingkungan yang berdampak mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta kenyamanan lingkungan hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Satpol PP untuk penyelesaian kasus pelanggaran ketertiban umum. Target capaian tahun 2022 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada tahun 2022 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2022.

Langkah strategis untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama yaitu pada Penyelesaian Pelanggaran (Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan), Persentase

Penegakkan Perda (Perda dan Perkada yang ditegakkan) yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
1. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kab. Tanjab Barat.
3. Melaksanakan penertiban penyakit ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
4. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas
5. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
6. Melaksanakan pencatatan pengaduan masyarakat secara lengkap untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya baik di Bidang Trantibum maupun di Bidang pengakan Perda dan Perkada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Melaksanakan pengukuran indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja SatPol PP dengan membagikan kuesioner hardcopy maupun melalui link yang dibagikan supaya kinerja dapat terukur.

**e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 dengan dukungan sumber daya manusia sebanyak 28 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari segi efisiensi sumber daya manusia, dari jumlah PNS yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya yang ada saat ini masih kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022 adalah dibagi dalam 2 program, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022, adalah :

<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 2 program dengan 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

### C. Indeks Kepuasan Masyarakat

#### a. Deskripsi Responden

Hasil pengisian formulir secara online dan offline survei Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digunakan terdapat sebanyak 50 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 21 responden laki-laki dan 29 perempuan. Jadi responden perempuan lebih dominan dari pada laki-laki yang mengisi survei tersebut. Selanjutnya dilihat dari aspek pekerjaan responden terdapat diantaranya 1 orang PNS, 4 swasta, 1 Pegawai Swasta, Wirausaha 12 dan 28 orang lainnya, dan 4 orang ibu rumah tangga sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 18. Responden IKM SatPol PP berdasarkan jenis kelamin

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	21
2	Perempuan	29
	<b>Grand Total</b>	<b>50</b>

Tabel 19. Responden IKM SatPol PP berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Diploma	1
2	MAHASISWA	2
3	S1	7
4	SD	1
5	SMA/SLTA	34
6	SMP	5
	<b>Total</b>	<b>50</b>

Tabel 20. Responden IKM SatPol PP berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	WIRAUSAHA	12
2	TNI/POLRI/PNS	1
3	Swasta	4
4	PEGAWAI SWASTA	1
5	LAINNYA	28
6	IBU RUMAH TANGGA	4
	<b>Total</b>	<b>50</b>

#### b. Evaluasi Unsur

Hasil pengisian kuesioner survei evaluasi unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digunakan, dapat disimpulkan pertanyaan pada unsur Pelayanan U8 yang berkaitan Sarana dan prasarana mendapat respon “Kurang Baik”, sedangkan pertanyaan U4 (Biaya /Tarif) dan U9 (pengaduan,sarana dan masukan) mendapat respon sangat baik. Selanjutnya pertanyaan pada point U1,U2,U3,U5,U6,U7 mendapat respon yang baik.

Tabel 21. Evaluasi unsur IKM Satuan Polisi Pamong Praja

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,34	83,50	Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,42	85,50	Baik
U3	Waktu Penyelesaian	3,20	80,00	Baik
U4	Biaya/tarif	3,90	97,50	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,38	84,50	Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,40	85,00	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,40	85,00	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	2,98	74,50	Kurang Baik
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,80	95,00	Sangat Baik

Hasil uraian dan tabel diatas, merekomendasikan kepada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

tersebut supaya dapat memperbaiki pelayanan publik yang berkaitan dengan persyaratan (U8) yang mendapat respon “Kurang Baik”, sedangkan unsur U1-U3 dan U5-U8 supaya dapat ditingkatkan dari respon “Baik” menjadi “Sangat Baik”.

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat sebesar 3,42 kemudian setelah konversi ke nilai Indeks menjadi 85,61 (Baik), jadi berdasarkan nilai tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai “Baik”, karena rata-rata hampir semua unsur pelayanan mendapat respon kategori “Baik” dan sangat baik, hanya satu unsur mendapat respon “Kurang Baik” dari masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 22. IKM SatPol PP

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,34	0,37
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,42	0,38
U3	Waktu Penyelesaian	3,20	0,36
U4	Biaya/tarif	3,90	0,43
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,38	0,38
U6	Kompetensi pelaksana	3,40	0,38
U7	Perilaku pelaksana	3,40	0,38
U8	Sarana dan Prasarana	2,98	0,33
U9	Pengaduan, sarana dan masukan	3,80	0,42
NRR Tertimbang			3,42
Nilai Indeks setelah konversi			<b>85,61</b>
Kinerja Unit Pelayanan			<b>Baik</b>

Nilai IKM akan dikonversi untuk mendapatkan mutu layanan sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval konversi IKM	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Bila merujuk pada Nilai Interval Konversi IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 85,61 berada antara 76,61 – 88,30 maka diketahui mutu pelayanan **B** dengan kinerja unit pelayanan “ **Baik** “.

Tabel 23. Pengolahan data survey kepuasan Masyarakat Per Responden dan unsur pelayanan

Nomor Urut Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	0	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	4
5	3	3	3	4	3	3	4	3	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4
10	3	3	3	4	4	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	4	3	0	4
12	4	3	4	4	4	3	3	3	4
13	4	4	3	4	3	4	4	4	4
14	3	3	3	4	3	3	3	0	4
15	3	3	3	4	3	3	3	0	4
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4
17	3	4	3	4	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4
19	3	4	3	4	3	3	4	3	4
20	3	4	3	4	3	4	4	4	4
21	4	4	3	4	3	3	3	4	4
22	3	4	4	4	4	3	4	3	4
23	3	3	3	4	4	4	3	3	0
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	4	3	4	4	4	3	3	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	3	3	4	3	4	3	3	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	3	3	3	4	3	3	3	3	1
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	4	4	3	3	3	4
36	4	4	3	3	4	4	4	3	4
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	2	3	3	3	4	3	4
40	4	4	2	4	4	4	3	3	3
41	4	4	3	3	4	4	3	2	3

42	3	4	3	4	3	2	3	3	3
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	3	3	3	4	3	3	3	3	4
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4
47	3	3	3	4	3	4	4	3	4
48	3	3	3	4	3	3	3	3	4
49	3	3	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	3	4	3	4	4	3	4
Total	167	171	160	195	169	170	170	149	190
NRR	3,34	3,42	3,20	3,90	3,38	3,40	3,40	2,98	3,80
Nilai tertimbang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
NRR Tertimbang	0,37	0,38	0,36	0,43	0,38	0,38	0,38	0,33	0,42
Indeks Per Unsur	83,50	85,50	80,00	97,50	84,50	85,00	85,00	74,50	95,00
Indeks Total	<b>85,61</b>								

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 adalah sebesar 85,61. Dengan nilai mutu B, Hasil yang telah dicapai ini lebih besar dibandingkan target Renstra Tahun 2022 dengan nilai interval konversi IKM sebesar 65,30 dengan nilai mutu pelayanan C.

Adapun data pendukung lainnya untuk hasil survey kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga didapat dari hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 merujuk pada surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor : 000.8/357/Org Tanggal 14 Februari 2023 tentang Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022. Berdasarkan hasil survey didapat Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 91,30 dengan kategori mutu pelayanan sangat baik.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten



Tanjung Jabung Barat di tahun 2022. Adapun indikator terhadap Jumlah Pagu Anggaran serta Realisasi Keuangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 24. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Perkembangan Pelaksanaan			Sisa Anggaran
		Jumlah	Proporsi	Realisasi Keuangan	Keuangan	Fisik	
		( Rp. )	( % )	( Rp. )	( % )	( % )	( Rp. )
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,234,294,111</b>	<b>55.30%</b>	<b>4,244,451,720</b>	<b>81.09%</b>	<b>97 %</b>	<b>989,842,391</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6,102,960</b>		<b>6,084,896</b>			<b>18,064</b>
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,102,960	100%	6,084,896	99.70%	100%	18,064
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,188,129,026</b>		<b>3,326,893,019</b>			<b>861,236,007</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,072,629,026	97.24%	3,219,643,019	79.06%	94,56 %	852,986,007
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115,500,000	2.76%	107,250,000	92.86%	100%	8,250,000
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>197,730,400</b>		<b>196,814,100</b>			<b>916,300</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	197,730,400	100%	196,814,100	99.54%	100%	916,300
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>301,806,575</b>		<b>224,637,598</b>			<b>77,168,977</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,733,885	0.91%	2,733,885	100%	100%	0
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,548,718	14.10%	42,410,120	99.67%	100%	138,598
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,575,000	15.43%	38,400,000	82.45%	100%	8,175,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,464,672	3.47%	5,804,672	55.47%	100%	4,660,000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,600,000	2.19%	5,130,000	77.73%	100%	1,470,000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192,884,300	63.91%	130,158,921	67.48%	100%	62,725,379
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>282,700,000</b>		<b>282,700,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	282,700,000	100%	282,700,000	100%	100%	0
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54,445,000</b>		<b>37,399,007</b>			<b>17,045,993</b>

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,725,000	5.01%	2,559,200	93.92%	100%	165,800
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	16,920,000	31.08%	12,039,807	71.16%	95,74 %	4,880,193
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34,800,000	63.92%	22,800,000	65.52%	65,51 %	12,000,000
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>203,380,150</b>		<b>169,923,100</b>			<b>33,457,050</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122,992,350	60.47%	105,708,500	85.95%	100%	17,283,850
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,737,800	25.93%	39,335,000	74.59%	100%	13,402,800
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,040,000	3.95%	6,290,000	78.23%	84,82 %	1,750,000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,610,000	9.64%	18,589,600	94.80%	100%	1,020,400
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4,231,323,583</b>	<b>44.70%</b>	<b>4,142,694,057</b>	<b>97.91%</b>	<b>91%</b>	<b>88,629,526</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4,170,747,971</b>		<b>4,096,898,071</b>			<b>73,849,900</b>
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4,111,789,051	98.59%	4,051,214,151	98.53%	99%	60,574,900
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	7,320,000	0.18%	5,120,000	69.95%	100%	2,200,000
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,017,536	0.37%	13,267,536	88.35%	89,76 %	1,750,000
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	36,621,384	0.88%	27,296,384	74.54%	77,39 %	9,325,000
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>60,575,612</b>		<b>45,795,986</b>			<b>14,779,626</b>

	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	18,626,012	30.75%	16,288,486	87.45%	91,94 %	2,337,526
	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	41,949,600	69.25%	29,507,500	70.34%	89,80 %	12,442,100
	<b>TOTAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>9,465,617,694</b>	<b>100%</b>	<b>8,387,145,777</b>	<b>88.61%</b>	<b>94%</b>	<b>1,078,471,917</b>

Pencapaian penggunaan anggaran Tahun 2022 secara keseluruhan sebesar 88,61 % dan realisasi fisik yang telah dilaksanakan mencapai 94%.

## BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dan dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDAG SURYA, MM**

Perdana Muda

NIP. 19650619 198512 1 001

**JUMLAH PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022**

<b>N O</b>	<b>PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERDA YANG DILANGGAR</b>	<b>KET</b>
1.	Pedagang kaki Lima	25	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	Razia rutin dan Laporan dari media sosial;
2.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	2	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp;
3.	Protokol Kesehatan Covid-19	21	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Razia rutin dan Laporan masyarakat melalui media sosial
4.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	15	Perda No. 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp;
5.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	16	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp
6.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	4	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp
	<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>		

## DATA PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022

No.	Hari/Tanggal	Nama Pelanggaran	Alamat	Perda yang dilanggar	Tindakan yang diambil	Ket
1.	Rabu, 09 Februari 2022		Jl. Jendral Sudirman ( Simpang Wisnok)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
2.	Kamis, 10 Februari 2022		Jl. Pahlawan (simpang Taman PKK)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
3.	Jum'at 11 Februari 2022		Jl. Patunas (Simpang GOR)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
4.	Sabtu 12 Februari 2022		Jl. KH. Dewanatara (Simpang Islamic)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
5.	Senin 14 Februari 2022		Jl.Prof. Sri Soedewi	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
6.	Selasa 15 Februari 2022		Jl. Patunas (Simpang SMA 1)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
7.	Rabu 16 Februari 2022		Jl. Jendral Sudirman ( Simpang Wisnok)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
8.	Kamis 17 Februari 2022		Jl. Pahlawan (simpang Taman PKK)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
9.	Jum'at 18 Februari 2022		Jl. Patunas (Simpang GOR)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
10.	Senin 21 Februari 2022		Jl. KH. Dewanatara (Simpang Islamic)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
11.	Selasa 22 Februari 2022		Jl.Prof. Sri Soedewi	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
12.	Rabu 23 Februari 2022		Jl. Patunas (Simpang SMA 1)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
13.	Kamis 24 Februari 2022		Jl. Jendral Sudirman ( Simpang Wisnok)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
14.	Jum'at 25 Februari 2022		Jl. Pahlawan (simpang Taman PKK)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai

15.	Selasa 01 Maret 2022	MARDANI	Jl. Lintas Tungkal Jambi RT 10 Kel. Bram Itam Kiri	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/01 Satpol PP /2022	Selesai
16.	Rabu 02 Maret 2022		Jl. KH. Dewantar a (Simp. Islamic)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
17.	Jum'at 04 Maret 2022		Jl.Prof. Sri Soedewi	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
18.	Senin 07 Maret 2022		Jl. Patunas (Simpang SMA 1)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
19.	Selasa 08 Maret 2022		Jl. Jendral Sudirman ( Simpang Wisnok)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
20.	Kamis 10 Maret 2022		Jl. Pahlawan (simpang Taman PKK)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
21.	Senin 14 Maret 2022		Jl. Patunas (Simpang GOR)	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19	Selesai
22.	Rabu 16 Maret 2022	YUNI FEBRIANTI	Jl. Bahagia Gg. Bintang	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/02/ Satpol PP /2022	Selesai
23.	Minggu 20 Maret 2022		Jl.Prof. Sri Soedewi	Perda Nomor : 4 Tahun 2020	- Himbauan dan Pengawasan Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan Covid- 19	Selesai
24.	Jum'at 25 Maret 2022	RANDI	Dusun Warga Rukun RT 09 Desa Teluk Kulbi, Kec. Betara	Perda Kab. Tanjung Barat Nomor : 9 tahun 2014	- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Sex Bebas dan Pidana yang Ditimbulkan dari Perbuatan Tersebut - Memanggil Keluarga yang Bersangkutan	Selesai



					<p>agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/01/Satpol PP /2022 agar tidak Mengulangi kesalahan Serupa Dimasa yang akan Datang</li> </ul>	
25.	Jum'at 25 Maret 2022	RUDI SALAM	Dusun Pasar RT 12 Desa Pematang Lumut Kec. Betara	Perda Kab. Tanjab Barat Nomor : 9 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Sex Bebas dan Pidana yang Ditimbulkan dari Perbuatan Tersebut</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/02/Satpol PP /2022 agar tidak Mengulangi kesalahan Serupa Dimasa yang akan Datang</li> </ul>	Selesai
26.	Jum'at 25 Maret 2022	ANDI SAYUTI	Dusun Pasar RT 022 Desa Pematang Lumut Kec. Betara	Perda Kab. Tanjab Barat Nomor : 9 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Sex Bebas dan Pidana yang Ditimbulkan dari Perbuatan Tersebut</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/03/Satpol PP /2022 agar tidak Mengulangi kesalahan Serupa Dimasa yang akan Datang</li> </ul>	Selesai
27.	Kamis 31 Maret 2022	DEWIYANA	Lrg. Cempaka Putih Kel.	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan Dinas</li> </ul>	Selesai



			Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir	Ketertiban Umum	Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/06/Satpol PP/2022, tgl.31 Maret 2022 - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/07/Satpol PP /2022	
28.	Minggu 24 April 2022	ANDIKA	Jln. Bawal RT. 004 Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/10/Satpol PP/2022, tgl.24 April 2022 - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/74/Satpol PP /2022	Selesai
29.	Rabu 01 juni 2022	M.RIZKI	Jl. Manungga 1 2 Lrg. Bina Bersama RT 009 Kel. Tungkal II	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/12/Satpol PP/2022, tgl.01 Juni 2022 - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/13/Satpol PP /2022	Selesai
30.	Kamis 9 Juni 2022	Mr. X	Ditemukan Dirawarawa (Parit Muda) RT 01 Kel. Betara Kiri Kec. Kuala Betara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/15/Satpol PP /2022	Selesai

31.	Kamis 13 Juni 2022	ZUMRIA	Gg. Mawar RT 13 Kel. Tungkal Harapan Kec Tungkal Iilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/17/Satpol PP/2022, tgl.13 juni 2022 - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/16/ Satpol PP /2022	Selesai
32.	Senin 20 Juni 2022	AMIN	Jl. Ahmad II RT 014 Kel. Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor : 331/18/ Satpol PP /2022	Selesai
33.	Kamis 7 Juli 2022	ACOK	Jl. Roro RT 01 Desa Tungkal I Kec. Tungkal Iilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/19/Satpol PP/2022, tgl.07 Juli 2022	Selesai
34.	Kamis 14 Juli 2022	HERIYANTO	Jl. Muktar BTN Permata Hijau Blok. B RT. 21 Kel. Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Huruf f dan h Jo Pasal 21 ayat (1)	- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/19/Satpol PP/2022, tgl.07 Juli 2022	Selesai

35.	Minggu 17 Juli 2022	RUDI	Jl. Madrasah RT 017 Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif Apabila Dikonsumsi Terus-Menerus</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</li> <li>- Membuat surat Pernyataan Nomor : 031/26/Satpol PP 2022 agar Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> <li>- Membuat Surat Acara Berita Penyerahan Nomor : 331/27/Satpol PP 2022 Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> </ul>	Selesai
36.	Minggu 17 Juli 2022	SAPRIZAL	Jl. Melati RT. 09 Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif Apabila Dikonsumsi Terus-Menerus</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</li> <li>- Membuat surat Pernyataan Nomor : 031/22/Satpol PP 2022 agar Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa</li> </ul>	Selesai

					<p>yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Acara Berita Penyerahan Nomor : 331/23/Satpol PP 2022 Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> </ul>	
37.	Minggu 17 Juli 2022	ERIK	Jl. Madrasah RT 09 Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif Apabila Dikonsumsi Terus-Menerus</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</li> <li>- Membuat surat Pernyataan Nomor : 031/20/Satpol PP 2022 agar Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> <li>- Membuat Surat Acara Berita Penyerahan Nomor : 331/21/Satpol PP 2022 Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> </ul>	Selesai
38.	Minggu 17 Juli 2022	EGEL	Jl. Sentral RT 017 Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Arahan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Zat Adiktif Apabila Dikonsumsi Terus-Menerus</li> <li>- Memanggil Keluarga yang Bersangkutan</li> </ul>	Selesai

					<p>agar Dilakukan Pembinaan dan Pendidikan dalam Keluarga Sebagaimana Mestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat Pernyataan Nomor : 031/24/Satpol PP 2022 agar Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> <li>- Membuat Surat Acara Berita Penyerahan Nomor : 331/25/Satpol PP 2022 Tidak Mengulangi Kesalahan yang Serupa Dimasa yang akan Datang. Tgl 17 Juli 2022</li> </ul>	
39.	Sabtu 6 Agustus 2022	WAHYU	Desa Sialang RT 10	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/ /Satpol PP/2022, tgl.6 Agustus 2022</li> </ul>	Selesai
40.	Rabu 17 Agustus 2022	SAHRONI	Jl. Parit 4 Darat RT. 04 Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/29 /Satpol PP/2022, tgl.6 Agustus 2022</li> <li>Berita Acara Penyerahan Nomor 331/30/Satpol PP 2022</li> </ul>	Selesai
41	Selasa 30 Agustus 2022	JUNAI	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Menegur Pedagang Kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang melanggar</li> </ul>	Selesai

					peraturan daerah yang berlaku	
42	Kamis 01 September 2022	DEDI	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
43	Senin 5 September 2022	ANAN	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	- Anggota Menegur pemilik Kendaraan Roda Empat yang melakukan Bongkar muat supaya tidak Menimbulkan Kemacetan Lalulintas Agar tidak melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
44	Selasa 6 September 2022	Ipan	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota Menegur Pedagang Buah yang berjualan di Bahu jalan sehingga Menggangu Ketertiban Umum tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	Selesai
45	Kamis 8 September 2022	Fahrul	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur pedagang yang berjualan dibahu jalan sehingga menggangu ketertiban umum tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku	Selesai
46	Jum'at 9 September 2022	Rafli	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur Pedagang yang berjualan dibahu jalan Sehingga tidak menggangu Ketertiban Umum	Selesai
47	Rabu 14 September 2022	Fajar	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur Pedagang Kaki Lima yang berjualan dibahu Jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Ynag berlaku	Selesai
48	Kamis 15 September 2022	Azmi	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur Pedagang yang berjualan dibahu Jalan sehingga menggangu Ketertiban Umum dan melanggar Peraturan daerah yang ber laku	Selesai

49	Jum'at 16 September 2022	Katinem	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur Pedagang yang berjualan diatas Trotoar yang menggaggu ketertiban umum An.Katinem agar tidak melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
50	Senin 19 September 2022	Rukmaini	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Meneggur Pedagang Kaki lima yang berjualan dibahu jalan agar tidak menggaggu ketertiban Umum sesuai Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
51	Kamis, 22September 2022	AMAT	Jl. Bayan RT.02 Kel.Sriwija ya Kec. Tungkal Ilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Surat Pernyataan Nomor : 031/34 /Satpol PP/2022, Berita Acara Penyerahan Nomor 331/33/Satpol PP 2022 tgl 22 September 2022	Selesai
52	Kamis, 22 September 2022	Amina	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota menegur Pedagang yang berjualan dibahu jalan yang menggaggu ketertiban Umum sehingga Melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
53	Jum'at 23 September 2022	Randi	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota Menegur Pedagang yang berjualan dibahu jalan Agar Tidak menggaggu Lalulintas dan selalu menjaga Ketertiban Umum	Selesai
54	Rabu 28 September 2022	Randy	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan agar selalu mematuhi peraturan daerah yang berlaku	Selesai
55	Kamis, 29September 2022	Deni Aprianto Saputra	Jl.Kepala Gading Rt.18	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan	Selesai

					Pengobatan di RSJ Jambi - Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor 331/35/Satpol PP 2022 tgl 29 September 2022	
56	Senin 3 Oktober 2022	sigit	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- anggota menegur pedagang buah yang berjualan di bahu jalan yang melanggar peraturan daerah yang berlaku	Selesai
57	Senin 3 Oktober 2022	Saleh	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
58	Selasa 4 Oktober 2022	Lia	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
59	Rabu 12 Oktober 2022	Iwan	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
60	Kamis 13 Oktober 2022	toko semarang	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
61	Rabu 26 Oktober 2022	Ihsan	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
62	Rabu 26 Oktober 2022	ANDRIZAL	Jl. Kesejahtra an RT.07 Kel Tungkal II Kec.Tungkal Ilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Terkait Rujukan Pengobatan di RSJ Jambi	Selesai



					- Membuat Berita Acara Penyerahan Nomor 331/36/Satpol PP 2022 27 Oktober 2022	
63	Rabu 2 November 2022	Toko Gunung Sari	Jalan Asia	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	- Anggota menegur pemilik Toko Gunung Sari dan Sopir yang melaksanakan Bongkar Muat dan menggagu Lalulintas sehingga Menimbulkan kemacetan di Jl.Asia	Selesai
64	Senin 7 November 2022	sigit	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
65	Senin 14 November 2022	Budi	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
66	Rabu 16 November 2022	Syaiful Kholis	Jl. Madura RT.007 Kecamatan Tebing Tinggi	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Anggota Mengamankan ODGJ yang Meresahkan Masyarakat dan Mengganggu Ketertiban Umum - Berkoordinasi dengan Dinas terkait dalam Pemrosesan Rujukan diRSJ Jambi	Selesai
67	Senin 21 November 2022	Boby	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
68	Senin 21 November 2022	Narti	Sungai Kepayang Kec.senyayang	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum	- Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Meresahkan Masyarakat - Berkoordinasi dengan Dinas	Selesai

					terkait dalam Pemrosesan Rujukan diRSJ Jambi	
69	Selasa 22 November 2022	Haris	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
70	Kamis 24 November 2022	An.Iyut	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	Selesai
71	Sabtu 10 Desember 2022	ITA PURNAMA SARI	Palemban g	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut. - Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.	Selesai
72	Sabtu 10 Desember 2022	Eda	Batang Hari	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut. - Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.	Selesai
73	Sabtu 10 Desember 2022	Maria handasari	Palemban g	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut. - Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa	Selesai

					yang akan datang.	
74	Sabtu 10 Desember 2022	Iman	Betara	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar 75berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.</li> </ul>	Selesai
75	Sabtu 10 Desember 2022	Novi Oktavianti	Jambi	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.</li> </ul>	Selesai
76	Sabtu 10 Desember 2022	Musrinah	Pekalongan	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.</li> </ul>	Selesai
77	Sabtu 10 Desember 2022	Tri Epi Febrianti	Bungo	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa</li> </ul>	Selesai

					yang akan datang.	
78	Sabtu 10 Desember 2022	Yuliska	Jambi	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang.</li> </ul>	Selesai
79	Minggu 11 Desember 2022	Andi Hotma Patisah	Kec.Tungkal Ilir	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang nomor : 031/48/Satpol PP/2022</li> </ul>	Selesai
80	Minggu 11 Desember 2022	Sekar Nanda aulia	Kota Jambi	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang nomor : 031/49/Satpol PP/2022</li> </ul>	Selesai
81	Sabtu 17 Desember 2022	Misnawati	Parit Selamat	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan</li> </ul>	Selesai

					kembali di masa yang akan datang nomor : 031/57/Satpol PP/2022	
82	Sabtu 17 Desember 2022	Syahrul Ansari	Parit 7	Perda Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang larangan Prostitusi dan Asusila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dengan pemberian arahan tentang bahaya sex bebas dan pidana yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.</li> <li>- Membuat Surat Pernyataan agar berjanji tidak melakukan kembali di masa yang akan datang nomor : 031/63/Satpol PP/2022</li> </ul>	Selesai
83	Rabu, 21 Desember 2022	M.Ilham	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 3 Ayat 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku</li> </ul>	Selesai



**DOKUMENTASI : PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**



**DOKUMENTASI : PELANGGARAN BONGKAR MUAT BARANG**





**DOKUMENTASI : PROTOKOL KESEHATAN Covid-19**



**DOKUMENTASI : PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA**



## DOKUMENTASI : ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)



## DOKUMENTASI : PENGGUNA ZAT ADIKTIF (LEM)





**Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Kejadian Bencana  
(Deteksi Dini) Tahun 2022**

<b>1</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA TANJUNG BOJO</b>	
	Hari / Tanggal	: Sabtu / 29 Januari 2022
	Pukul	: 12.05 WIB
	Lokasi	: RT 05 Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam.
	Kronologis	: Laporan kebakaran diberitahukan oleh ketua RT. 05 yang terjadi di rumah Bapak Hairun. Ketua RT. 05 langsung memberitahukan dan menggerakkan warga sekitar agar segera membantu memadamkan api.
	Data Korban	: Dalam kejadian tersebut tidak ada korban
	Data Kerusakan	: 1 (satu) rumah hangus terbakar dengan total kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,-.
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
	Personil yang turun	: -
	Penyebab kebakaran	: Diperkirakan berasal dari obat nyamuk bakar yang ditinggal pemilik rumah.

<b>2</b>	<b>KEBAKARAN DI JALAN PALEMBANG TUNGKAL ILIR</b>	
	Hari / Tanggal	: Senin / 31 Januari 2022
	Pukul	: 14.30 WIB
	Lokasi	: Jln. Jendral Ahmad Yani / Jln Palembang, Kecamatan Tungkalsari
	Kronologis	: Laporan kebakaran diberitahukan warga sekitar yang melihat api berkobar dengan cepat dan segera memberikan pertolongan memadamkan api. Warga juga memberitahukan kepada Damkar Kabupaten untuk segera turun kelokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar dibantu oleh Satpol PP, yayasan budi luhur, babinsa setempat dan babinkamtibmas. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam dilakukan usaha pemadaman.
	Data Korban	: 1 (satu) orang mengalami luka ringan karena dalam proses pemadaman dan evakuasi harta dan benda saat terjadi kebakaran.
	Data Kerusakan	: 14 (empat belas) rumah habis terbakar, rumah 06 (enam) pintu serta 06 (enam) unit rumah rusak ringan dengan kebakaran dibagian atap. Yang terdiri dari 20 Kepala Keluarga dengan nama sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M. dang H. nanguy</li> <li>2. Evi</li> <li>3. Alim</li> <li>4. Kamsuri</li> </ol>

		<p>5. Amirudin 6. Udin 7. Rustam 8. Awi 9. Aseng 10. Heri 11. Mujiono 12. Lutfi 13. Mat Amin 14. Aleng Teddy 15. Dessy Karlina 16. Sides 17. Iwan Sugianto 18. Rahman 19. Ali Aseng 20. H. Bahar</p> <p>untuk perkiraan total kerugian materi secara keseluruhan adalah Rp. 2.400.000.000,-.</p>
Upaya Pertolongan	:	<p>Pemadaman api dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Damkar Kabupaten</li> <li>2. Yayasan Budi Luhur</li> <li>3. Satpol PP Kabupaten</li> <li>4. Babinkabtibmas</li> <li>5. Babinsa</li> <li>6. Dibantu juga oleh warga setempat yang turut membantu dengan cara manual menyiram api.</li> </ol>
Personil yang turun	:	<p>Anggota yang turun dalam pemadaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Damkar 30 orang personil dengan 2 mobil dan 1 mesin portable.</li> <li>2. Yayasan Budi Luhur dengan 10 orang personil 1 mobil pemadam.</li> <li>3. Satpol PP 30 orang personil</li> <li>4. Babinkamtibmas 1 orang</li> <li>5. Babinsa 3 orang</li> </ol>
Penyebab kebakaran	:	Dugaan sementara akibat korsleting listrik dari meteran listrik.

<b>3</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN PELABUHAN DAGANG</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 05 Maret 2022
Pukul	:	18.40 WIB
Lokasi	:	Jln. Raden Usman RT. 06 Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan

		Tungkal Ulu.
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan oleh warga setempat melihat adanya kobaran api di kebun belakang rumah warga yang tepat rumah ibu Rosneli. Warga segera memberitahukan RT dan pemilik lahan agar segera memadamkan api di lahan tersebut agar tidak merembet ke lahan warga sekitar.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) petak lahan yang diduga semak belukar dengan beberapa tanaman sawit hampir habis terbakar.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dengan menggunakan peralatan seadanya, api berhasil dipadamkan dua jam kemudian.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran tapi dugaan sementara pemilik kebun ingin membakar semak untuk menghilangkan semak belukar yang tumbuh.

<b>4 KEBAKARAN DI JALAN BERINGIN UJUNG</b>		
Hari / Tanggal	:	Senin / 28 Maret 2022
Pukul	:	22.15 WIB
Lokasi	:	Jln Beringin Ujung (Parit Lapis) Rt. 14 Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran berdasarkan laporan masyarakat setempat melihat adanya api yang membesar dari rumah Bapak Patrio Khadafi, sekitar pukul 22.15 WIB. Ketua RT langsung memberitahukan Damkar Kabupaten agar segera mungkin memadamkan api yang semakin membesar. Damkar dan Satpol PP turun kelokasi kejadian memadamkan api dengan proses sampai satu jam kemudian.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan perkiraan total kerugian keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota Damkar, Satpol PP dan bantuan dari warga setempat.
Personil yang turun	:	Personil yang turun dalam kejadian tersebut anggota Damkar dengan 20 orang personil dengan 2 mobil pemadam, Satpol PP dengan 30 orang personil untuk membantu pengamanan proses pemadaman dan avakuasi di lokasi kejadian.

Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran dan masih dalam proses penyelidikan.
--------------------	---	---

<b>5 KEBAKARAN DI DESA PURWODADI</b>		
Hari / Tanggal	:	Kamis / 31 Maret 2022
Pukul	:	09.00 WIB
Lokasi	:	Jalan Cempaka RT. 14 RW. 02 Dusun Sidomukti, Desa Purwodadi. Kecamatan Tebing Tinggi.
Kronologis	:	Laporan kebakaran berdasarkan laporan masyarakat setempat melihat adanya api yang membesar pada bagian samping rumah Bapak Imam Tauhid. Saksi langsung berinisiatif memberitahu RT untuk segera ke lokasi kebakaran, RT dan warga secara bersama sama membantu memadamkan api yang sudah semakin membesar dengan menggunakan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk pengecekan lebih lanjut.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan pemilik atas nama Bapak Imam Tauhid. Api yang cepat merambat dan membakar disebabkan rumah samping terdiri dari kayu dan papan. Adapun perkiraan jumlah total kerugian berjumlah Rp. 150.000.000,- termasuk didalamnya 1 (satu) unit sepeda motor.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran tapi dugaan sementara akibat korsleting listrik.

<b>6 KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN</b>		
Hari / Tanggal	:	Jum'at / 08 April 2022
Pukul	:	12.14 WIB
Lokasi	:	Jalan Pangeran Diponegoro (Kelapa Gading) RT 06 Jalan mustafa dan jalan Mawar, Kelurahan Tungkai Harapan, Kecamatan Tungkai Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan warga sekitar yang melihat api berkobar dengan cepat dan segera memberikan pertolongan memadamkan api. Warga juga memberitahukan kepada Damkar Kabupaten untuk segera turun ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar dibantu oleh Satpol PP, yayasan budi luhur, babinsa

		setempat dan babinkamtibmas. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam dilakukan usaha pemadaman dan dilanjutkan dengan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	12 (dua belas) unit rumah habis terbakar, 4 (empat) bedeng habis terbakar dengan total kerugian yang diderita pemilik rumah secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.510.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh personil damkar, anggota Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas, yayasan Budi Luhur dengan dibantu oleh masyarakat setempat.
Personil yang turun	:	1. Damkar pleton 2 dengan memakai 3 (tiga) unit mobil pemadam kebakaran. 2. Satpol PP dengan 30 orang personil 3. Babinsa 3 orang personil 4. Babinkamtibmas 1 orang personil 5. Yayasan Budi Luhur 10 orang dengan 1 unit portable kebakaran
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan).

<b>7</b>	<b>KEBAKARAN DI DUSUN MEKAR SARI DESA SUNSANG</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 17 April 2022
Pukul	:	20.14 WIB
Lokasi	:	RT. 11, Dusun Mekar Sari Desa Sunsang, Kecamatan Senyerang
Kronologis	:	Ketua RT mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kebakaran dari warga di salah satu rumah dengan nama pemilik atas nama Ibu Tumirah. Proses pemadaman yang dilakukan oleh warga secara mandiri dan gotong royong berlangsung selama satu jam dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk mencari sisa sisa dari kebakaran yang masih bias diselamatkan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan kerugian diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 1.000.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar dengan gotong royong menggunakan alat seadanya.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Diduga akibat dari ledakan kompor gas pada saat memasak dirumah yang bersangkutan.

<b>8</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA DUSUN MUDO</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 30 April 2022
Pukul	:	05.20 WIB
Lokasi	:	Jl. Lintas Timur, Rt. 11 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik.
Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi di rumah Bapak Mudaqir yang pada saat kejadian terjadi saat aktifitas pagi akan dilakukan oleh istri dari Bapak Mudaqir. Api berasal dari ruang tengah rumah yang langsung membesar karena api tersebut berasal dari instalsi atas dek rumah. Warga sekitar yang melihat api yang sudah mulai membesar memberitahu Bapak Mudaqir kalau bagian rumahnya terbakar. Proses pemadaman yang dilakukan oleh warga secara mandiri dan gotong royong berlangsung selama satu jam dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk mencari sisa sisa dari kebakaran yang masih bias diselamatkan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah habis terbakar, 1 (satu) unit mobil truk terbakar dan 1 (satu) unit motor terbakar secara keseluruhannya terbakar dengan total kerugian diperkirakan kurang lebih Rp. 1.000.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting instalasi rumah.

<b>9</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN BETARA KIRI</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 09 Mei 2022
Pukul	:	02.30 WIB
Lokasi	:	Jl. H. Abdul Kadir (Parit Deli), RT 01, Kelurahan Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara.
Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi di gudang penyimpanan barang barang yang tidak terpakai diruang belakang pada rumah ibu Armah yang pada saat kejadian sedang tidak berada ditempat. Warga sekitar yang melihat ada kepulan asap dari rumah tersebut segera memberi tahu ketua RT dan segera berupaya memadamkan api yang sudah semakin membesar disebabkan angin yang cukup kencang dan rumah yang terbuat dari papan. Api berhasil pada setelah 2 (dua) jam dilakukan pemadaman.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran

		tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan perkiraan total kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh masyarakat setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi menurut saksi api berasal dari konsleting listrik.

<b>10</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN SENYERANG</b>	
	Hari / Tanggal	: Jum'at / 13 Mei 2022
	Pukul	: 21.00 WIB
	Lokasi	: RT. 14 Dusun Mursid, Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang.
	Kronologis	: Laporan kebakaran terjadi di rumah Bapak Syahroni, yang pada saat kejadian pada waktu pemilik rumah akan pergi untuk tidur. Petugas ronda keamanan lingkungan yang kebetulan melintas didepan rumah tersebut langsung membangunkan pemilik rumah. Warga dengan sigap dapat cepat bergotong royong memadamkan api yang sudah mulai membesar dengan menggunakan alat seadanya. Proses pemadaman berlangsung 2,5 jam.
	Data Korban	: Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
	Data Kerusakan	: 1 (satu) unit rumah hangus terbakar untuk total kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000,-
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh masyarakat setempat.
	Personil yang turun	: -
	Penyebab kebakaran	: Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi kuat dugaan api berasal dari konsleting instalasi listrik.

<b>11</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA KARYA MAJU</b>	
	Hari / Tanggal	: Senin / 16 Mei 2022
	Pukul	: 04.30 WIB
	Lokasi	: Jalan Parit 12 Desa Karya Maju RT. 10, Kecamatan Pengabuan.
	Kronologis	: Kebakaran yang terjadi di Jalan Parit 12 Desa Karya Maju RT. 10 bertempat di rumah atas nama Bapak Lucas yang pada saat kejadian lokasi rumah tersebut berdekatan dengan bengkel las yang tepat disebelah rumah Bapak Lucas. Api dengan cepat membesar

		disebabkan api menyambar wadah bahan bakar yang digunakan untuk proses pengelasan. Bapak Lucas dengan segera memberitahu warga untuk menolong memadamkan api. Api yang cepat membakar rumah dan 1 (satu) unit gudang sabut kelapa milik Bapak Lucas. Proses pemadaman berlangsung 2,5 jam yang dilakukan oleh warga sekitar.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah hampir habis terbakar dan 1 (satu) unit gudang sabut kelapa habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 300.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Diduga akibat dari percikan api pengelasan yang mengenai bahan bakar yang budah terbakar.

<b>12</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 23 Mei 2022
Pukul	:	23.00 WIB
Lokasi	:	Gang Sentral, RT. 17 Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran yang terjadi saat tengah malam dimana pemilik rumah sudah tidur dan kebakaran diberitahukan oleh warga yang kebetulan melihat api yang sudah mulai membesar dari rumah Bapak Masji. Karena kencangnya angin dan bahan material rumah yang terdiri dari kayu menyebabkan api menyebar dengan cepat kerumah sebelah. Warga kemudian memberitahukan kepada Damkar Kabupaten yang dengan segera turun kelokasi dan dibantu oleh Satpol PP, Yayasan Budi Luhur, Babinsa dan Babinkamtibmas. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam dilakukan usaha pemadaman dan dilanjutkan dengan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	Rumah yang habis terbakar berjumlah 4 (empat) unit rumah dan 2 (dua) unit rumah mengalami rusak parah. Dengan nama nama pemilik rumah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masji</li> <li>2. Junaida</li> <li>3. Jamila</li> </ol>



		<p>4. Safrudin</p> <p>5. Kamaludin</p> <p>6. Hasan</p> <p>total kerugian kurang lebih Rp. 800.000.000,- yang termasuk didalamnya 1 (satu) unit sepeda motor.</p>
Upaya Pertolongan	:	<p>Pemadaman api dilakukan oleh :</p> <p>1. Petugas Damkar Kabupaten</p> <p>2. Yayasan Budi Luhur</p> <p>3. Satpol PP Kabupaten</p> <p>4. Babinkabtibmas</p> <p>5. Babinsa</p> <p>6. Dibantu juga oleh warga setempat yang turut membantu dengan cara manual menyiram api..</p>
Personil yang turun	:	<p>Anggota yang turun dalam pemadaman :</p> <p>1. Damkar 30 orang personil dengan 2 mobil dan 1 mesin portable.</p> <p>2. Yayasan Budi Luhur dengan 10 orang personil 1 mobil pemadam.</p> <p>3. Satpol PP 30 orang personil</p> <p>4. Babinkamtibmas 1 orang</p> <p>5. Babinsa 3 orang</p>
Penyebab kebakaran	:	<p>Diduga akibat dari konsleting instalasi listrik dirumah yang bersangkutan.</p>

<b>13</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA PENOBAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 31 Mei 2022
Pukul	:	16.45 WIB
Lokasi	:	Jl. Lintas Timur RT 13 Desa Penoban, Kecamatan Batang Asam.
Kronologis	:	Kebakaran yang terjadi di rumah atas nama Bapak Oloan Simanjuntak. Kebakaran berlangsung dengan cepat sehingga dengan cepat menghabiskan rumah dan gudang kayu yang tepat disebelah rumah. Warga secara bergotong royong memadamkan api yang membutuhkan waktu sekitar dua setengah jam untuk memadamkan api yang juga kondisi gudang dan isi yang terbuat dari kayu/papan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah hangus terbakar, 1 (satu) gudang kayu habis terbakar dan 1 (satu) unit mobil operasional dengan total kerugian belum

		: dapat diperkirakan waktu data ini diambil.
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
	Personil yang turun	: -
	Penyebab kebakaran	: Diduga akibat dari konsleting listrik dari gudang kayu sebelah rumah.

<b>14</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN MEKAR JAYA</b>	
	Hari / Tanggal	: Sabtu / 10 Juni 2022
	Pukul	: 18.30 WIB
	Lokasi	: Parit Panglong RT. 01 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara.
	Kronologis	: Damkar mendapatkan laporan kebakaran di Parit Panglong RT. 01 Kelurahan Mekar Jaya yang terjadi di rumah pemilik Bapak Angga yang terbakar pada gudang pinang yang bersangkutan. Proses pemadaman berlangsung satu jam dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran dan mengidentifikasi penyebab kebakaran dari saksi mata/warga.
	Data Korban	: Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
	Data Kerusakan	: 1 (satu) rumah mengalami rusak ringan 1 (satu) gudang pinang habis terbakar dengan kerugian diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 600.000.000,-.
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh personil damkar dibantu oleh Satpol PP Kecamatan, Babinsa TNI dan warga sekitar.
	Personil yang turun	: Damkar unit Kecamatan 1 unit mobil pemadaman, Satpol PP Kecamatan 3 orang dan Babinsa 2 orang.
	Penyebab kebakaran	: Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi kuat dugaan api berasal dari konsleting instalasi listrik.

<b>15</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TEBING TINGGI</b>	
	Hari / Tanggal	: Jum'at / 17 Juni 2022
	Pukul	: 15.00 WIB
	Lokasi	: RT. 14 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi.
	Kronologis	: Laporan kebakaran terjadi di rumah Ibu Sakinah yang pada saat kejadian terjadi ibu sakinah pergi istirahat siang. Api berasal dari ruang tengah rumah yang langsung membesar karena api tersebut diduga berasal dari obat nyamuk yang menyambar karpet plastic rumah. Berdasarkan informasi dari ketua RT kejadian kebakaran

		berlangsung dengan cepat disebabkan rata-rata rumah yang berada dikawasan tersebut terbuat dari papan. Proses pemadaman berlangsung satu setengah jam dan dilanjutkan dengan penyisiran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	2 (dua) rumah rumah habis terbakar dengan total kerugian belum dapat diperkirakan disebabkan perlu penyelidikan dan pengecekan dari korban lebih lanjut.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan namun besar dugaan berasal dari obat nyamuk yang ditinggal tidur yang terjadi.

<b>16</b>	<b>KEBAKARAN DI JLN. PARIT PANCASILA RT.05 DESA SUAK SAMIN</b>	
	Hari / Tanggal	: Senin / 20 Juni 2022
	Pukul	: 19.10 WIB
	Lokasi	: Jl. Bawal RT. 04, 05 dan 06 Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir.
	Kronologis	: Petugas piket Damkar mendapatkan laporan kebakaran via telepon dari warga Jl. Bawal RT. 04, 05 dan 06 Kelurahan Kampung Nelayan. Berdasarkan informasi dari warga tersebut anggota Damkar Kabupaten turun kelokasi untuk memadamkan api di lokasi kejadian kebakaran. Kebakaran tersebut berlangsung dengan cepat disebabkan rumah tersebut terbuat dari papan dan tiupan angin yang ngat kencang sehingga menghambat proses pemadaman. Proses pemadaman berlangsung satu setengah jam dan dilanjutkan dengan penyisiran dan penyelidikan dilokasi kebakaran dan mengidentifikasi penyebab kebakaran dari saksi mata/warga.
	Data Korban	: Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
	Data Kerusakan	: 10 (sepuluh) terbakar habis terbakar, 3 (tiga) unit bedeng habis terbakar dan 1 (satu) gudang juga habis terbakar dengan perkiraan kerugian berjumlah kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- dengan nama nam korban sebagai berikut :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rudi</li> <li>2. Raina</li> <li>3. Agus</li> <li>4. Jamilah</li> <li>5. Monggot</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Asep</li> <li>7. Lelek</li> <li>8. Adris</li> <li>9. Sudirman</li> <li>10. Suhaimi</li> <li>11. Padli</li> </ul>
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman api dilakukan oleh : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Damkar Kabupaten</li> <li>2. Yayasan Budi Luhur</li> <li>3. Satpol PP Kabupaten</li> <li>4. Babinkabtibmas</li> <li>5. Babinsa</li> <li>6. Dibantu juga oleh warga setempat yang turut membantu dengan cara manual menyiram api..</li> </ul>
Personil yang turun	:	Anggota yang turun dalam pemadaman : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Damkar 30 orang personil dengan 2 mobil dan 1 mesin portable.</li> <li>2. Yayasan Budi Luhur dengan 10 orang personil 1 mobil pemadam.</li> <li>3. Satpol PP 30 orang personil</li> <li>4. Babinkamtibmas 1 orang</li> <li>5. Babinsa 3 orang</li> </ul>
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan namun besar dugaan berasal dari kompor yang meledak sewaktu memasak.

<b>17</b>	<b>KEBAKARAN DI JLN. DUSUN SENTOSA DESA TUNGKAL 1</b>	
Hari / Tanggal	:	Rabu / 06 Juli 2022
Pukul	:	17.00 WIB
Lokasi	:	Jl. Dusun Sentosa RT. 001 Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. Dusun Sentosa RT. 001 Desa Tungkal 1. Berdasarkan informasi dari warga kejadian kebakaran berlangsung dengan cepat disebabkan angin kencang dan kondisi waktu kejadian di jam warga memulai aktifitas/kegiatan untuk proses pemadaman api berlangsung selama kurang lebih satu jam. Pemadaman di laksanakan oleh Damkar, Satpol PP, Yayasan Budi Luhur, Babinsa serta dibantu oleh warga sekitar.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.

Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah terbakar dan mengalami rusak sedang atas nama Ibu Kalsum total kerugian kurang lebih 100 juta.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman api dilakukan oleh : 1. Petugas Damkar Kabupaten 2. Yayasan Budi Luhur 3. Satpol PP Kabupaten 4. Babinkamtibmas 5. Babinsa 6. Dibantu juga oleh warga setempat yang turut membantu dengan cara manual menyiram api..
Personil yang turun	:	Anggota yang turun dalam pemadaman : 1. Damkar 30 orang personil dengan 2 mobil dan 1 mesin portable. 2. Yayasan Budi Luhur dengan 10 orang personil 1 mobil pemadam. 3. Satpol PP 30 orang personil 4. Babinkamtibmas 1 orang 5. Babinsa 3 orang
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran dan masih dalam proses penyelidikan.

<b>18</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA PEMATANG LUMUT</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 24 Juli 2022
Pukul	:	16.00 WIB
Lokasi	:	Jl. H. Salman RT. 04 Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. H. Salman RT. 04 Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut terjadi pada 1 (satu) unit generator milik Telkomsel terbakar habis. Kejadian tersebut menurut warga akibat adanta konsleting dan diiringi dengan ledakan dari generator tersebut. Kejadian berlangsung dengan cepat warga pun mencoba untuk memadamkan api dengan sebisanya hingga petugas lapangan dari Telkomsel datang ke lokasi. Proses pemadaman api berlangsung selama kurang lebih satu jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit generator milik Telkomsel habis terbakar dengan total kerugian masih bisa diperkirakan sampai laporan ini dilaporkan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar.

Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti masih dalam proses penyelidikan dugaan sementara akibat kosleting listrik.

<b>19</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA SUNGAI TERAP</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 24 Juli 2022
Pukul	:	21.30 WIB
Lokasi	:	Dusun Agung RT. 08 Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara.
Kronologis	:	Kebakaran di Dusun Agung RT. 08 Desa Sungai Terap terjadi di rumah Bapak Taufikur Rahman. Kejadian kebakaran terjadi sekitar jam 21.30 WIB malam hari. Warga dan petugas pemadam kebakaran dari Damkar Kecamatan mengalami kendala dalam proses pemadaman karena kondisi dari sumber air yang sulit. Warga bersama sama ikut membantu mengambil air dari parit parit terdekat. Proses pemadaman api berlangsung selama kurang lebih satu jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar Kecamatan Betara dengan jarak tempuh dari pos Kabupaten sekitar 25 menit. Proses pemadaman juga dibantu warga sekitar.
Personil yang turun	:	1 (satu) regu dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan namun besar dugaan berasal dari konsleting listrik.

<b>20</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA SUNGAI MULUK</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 01 Agustus 2022
Pukul	:	11.40 WIB
Lokasi	:	Jl. Sultan Taha RT. 05 Desa Sungai Muluk Kecamatan Muara Papalik
Kronologis	:	Kebakaran terjadi di rumah Ibu Marsinah kejadian kebakaran tersebut terjadi menjelang tengah hari. Menurut warga sekitar api dengan cepat membakar rumah Ibu Marsinah karena bahan dari rumah tersebut sebagian besar terdiri dari kayu. Sebelum kebakaran tetangga korban sempat mendengar letupan dari ruang tengah rumah Ibu Marsinah. Warga secara gotong royong bersama sama berusaha memadamkan api, karena kondisi perumahan warga yang cukup

		rapat dan kondisi rumah yang rata-rata berbahan papan/asbes api dengan cepat membakar rumah. Proses pemadaman api berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dan 2 (dua) unit sepeda motor habis terbakar. Total kerugian belum dapat diidentifikasi dan masih dalam penyelidikan dan penghitungan kerugian.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Konsleting listrk.

<b>21</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TELUK NILAU</b>	
	Hari / Tanggal	: Jumat / 19 Agustus 2022
	Pukul	: 10.15 WIB
	Lokasi	: RT. 02 Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan.
	Kronologis	: Kebakaran yang terjadi berasal dari rumah Sahril yang menurut keterangan dari warga sekitar api sudah sangat besar dari arah belakang rumah Bapak Sahril. Kencangnya tiupan angin menyebabkan api menyebar ke rumah disebelah. Petugas piket damkar kecamatan betara yang mendapat berita langsung menuju lokasi kebakaran. Dalam kejadian ini petugas dengan sigap merespon dengan dibantu oleh Satpol PP Kecamatan yang bertugas dikantor Camat. Warga secara bersama sama ikut membantu proses pemadaman api yang memakan waktu proses pemadaman sekitar satu jam.
	Data Korban	: Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
	Data Kerusakan	: 6 (enam) rumah mengalami kerusakan parah akibat terbakar. Total kerugian belum dapat diperkirakan, adapun korban kebakaran sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sahril</li> <li>2. Udin\</li> <li>3. Hamid</li> <li>4. M. Yusuf</li> <li>5. Ramli</li> <li>6. Marjuki</li> </ol>
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar 1 (satu) peleton

		dengan menggunakan 1 (1) unit mobil dan Satpol PP Kecamatan dalam proses evakuasi dan pengamanan lokasi kejadian.
Personil yang turun	:	1 (satu) peleton dari damkar dan 3 (tiga) orang dari satpol pp kecamatan.
Penyebab kebakaran	:	Diduga berasal dari konsleting listrik kipas angin.

<b>22</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA DUSUN MUDO</b>	
	Hari / Tanggal	: Minggu / 04 September 2022
	Pukul	: 13.45 WIB
	Lokasi	: Jl. Lintas Timur Km. 91 RT. 08 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik.
	Kronologis	: Kebakaran di Jl. Lintas Timur Km. 91 RT. 08 Desa Dusun Mudo terjadi di rumah Bapak Iwan. Kebakaran tersebut terjadi di saat pemilik rumah meninggalkan rumah untuk kembali beraktifitas di kebun. Pada saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan kosong, sehingga api dengan cepat membakar rumah, warga sekitar yang melihat api yang telah besar segera memberikan pertolongan memadamkan api sambil memberi tahu pemilik rumah. Api dapat dipadamkan dengan memakan waktu proses pemadaman kurang lebih dua setengah jam yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan dan penyisiran lokasi oleh petugas babinsa, petugas desa dan pemilik rumah.
	Data Korban	: Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
	Data Kerusakan	: 1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan perkiraan kerugian yang belum dapat dipastikan.
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar 1 (satu) peleton dengan menggunakan 1 (1) unit mobil.
	Personil yang turun	: Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar.
	Penyebab kebakaran	: Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat tapi kuat dugaan api berasal dari obat nyamuk bakar yang ditinggal pemiliknya.

<b>23</b>	<b>KEBAKARAN DI JLN LINTAS UNGKAL JAMBI RT 13 KELURAHAN BRAM ITAM KIRI</b>	
	Hari / Tanggal	: Sabtu / 17 September 2022
	Pukul	: 13.30 WIB
	Lokasi	: Jln Lintas Tungkal Jambi RT. 13 Kelurahan Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam.



Kronologis	:	Kebakaran terjadi di gudang pinamng milik Bapak Rudi. Petugas piket damkar kecamatan mendapat telepon langsung menuju lokasi. Api dengan cepat dapat dipadamkan dengan bantuan dari masyarakat setempat yang ikut dalam proses pemadaman. Waktu proses pemadaman kurang lebih satu setengah jam yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendinganan dan penyisiran lokasi.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) gudang pinang habis terbakar dengan jumlah total kerugian belum dapat dipastikan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar 1 (satu) peleton dengan menggunakan 1 (1) unit mobil.
Personil yang turun	:	1 (satu) peleton dari damkar dan 2 (dua) orang dari satpol pp kecamatan.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.

<b>24</b>	<b>KEBAKARAN DI RT. 01 DUSUN KARYA TANI PASAR SENIN KECAMATAN PENGABUAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 17 September 2022
Pukul	:	14.45 WIB
Lokasi	:	Jln. Lintas Timur Tungkal Ulu RT.05 Desa Bebatang Tembaso 01, Kecamatan Tungkal Ulu.
Kronologis	:	Kebakaran di RT.05 Desa Bebatang Tembaso 01 terjadi di rumah Bapak Jalu. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat disebabkan penghuni dari rumah tersebut sedang beraktifitas di kebun. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah karena angin dan sarana untuk pemadaman yang seadanya. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah milik Bapak Jalu habis terbakar dengan jumlah total kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.

<b>25</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA SUNGAI KERUH</b>	
-----------	---------------------------------------	--

Hari / Tanggal	:	Senin / 26 September 2022
Pukul	:	09.05 WIB
Lokasi	:	Jl. Arjuna, Rt. 06, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebing Tinggi.
Kronologis	:	Kebakaran di RT.06 Desa Sungai Keruh terjadi di rumah Bapak Arianto. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat disebabkan adanya percikan api dari instalasi listrik yang langsung menyambar bagian rumah yang terbuat dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah karena angin dan sarana untuk pemadaman yang seadanya. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah milik Bapak Arianto habis terbakar dengan jumlah total kerugian kurang lebih Rp. 350.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Konsleting listrik dari instalasi rumah

<b>26</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN DUSUN KEBUN</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 04 Oktober 2022
Pukul	:	01.10 WIB
Lokasi	:	Jl. Lintas Timur, Rt. 02, Kelurahan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam.
Kronologis	:	Kebakaran di Rt. 02, Kelurahan Dusun Kebun terjadi di rumah Bapak Lim Prawira. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut diduga dari api lilin yang dipakai untuk penerangan tidur di malam hari api dengan cepat membakar rumah Bapak Lim Prawira disebabkan kondisi rumah yang terbuat dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan dibantu dengan petugas damkar dan anggota satlinmas desa kelurahan. Api dengan cepat membakar semua isi rumah karena angin dan sarana untuk pemadaman yang seadanya. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah milik Bapak Lim Prawira habis terbakar dengan jumlah total kerugian masih dalam perkiraan.

Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh damkar kecamatan, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Api lilin penerangan tidur malam hari.

<b>27</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Jumat / 14 Oktober 2022
Pukul	:	12.00 WIB
Lokasi	:	Jl. Jendral Sudirman Rt. 12 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. Jendral Sudirman Rt. 12 Kelurahan Tungkal IV Kota terjadi di rumah Bapak M. Nasir. Menurut laporan kejadian kebakaran tersebut diduga dari api kompor gas yang meledak dan dapat didengar oleh warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera mendatangi lokasi kejadian dan melihat api sudah membesar dibagian dapur rumah bapak M. Nasir. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan dibantu dengan anggota satlinmas desa kelurahan. Api dengan cepat membakar bagian dapur. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah milik Bapak M. Nasir habis terbakar pada bagian dapur dengan jumlah total kerugian masih dalam perkiraan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh damkar, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Api dari kompor gas yang meledak.

<b>28</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN DAN LORONG BUDIMAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 16 Oktober 2022
Pukul	:	15.10 WIB
Lokasi	:	Jl. Hidayah Rt. 19 Kelurahan Tungkal Harapan dan Lorong Budiman Rt. 08 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. Hidayah Rt. 19 Kelurahan Tungkal Harapan dan Lorong Budiman Rt. 08 terjadi di rumah Bapak Rudi Hendra, Ibu Titin Martini, Bapak Zakaria, Bapak Zefri Yadan, Bapak M. Saini, Bapak R. Simanjuntak, Bapak Abd. Karim dan Bapak Madluddin. Menurut laporan kejadian kebakaran tersebut belum dapat diketahui penyebabnya tapi kuat dugaan berasal dari konsleting listrik. Warga,

		anggota damkar kabupaten, satpol pp, yayasan budi luhur dan warga setempat termasuk anggota satlinmas desa/kelurahan turut membantu bahu membahu memadamkan api yang sudah membesar. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam dan dilakukan proses pendinginan dan penyisiran lokasi kebakaran untuk menyelamatkan barang barang yang masih bisa digunakan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	10 (sepuluh) rumah terbakar dengan kategori : 6 (enam) rumah habis terbakar, 2 (dua) rumah rusak sedang dan 2 (dua) rumah rusak ringan dengan jumlah total kerugian masih dalam perkiraan sampai laporan ini dibuat.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar, yayasan budi luhur, satpol pp, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam dari damkar, 1 unit dari yayasan budi luhur
Personil yang turun	:	Damkar 1 pleton, satpol pp 1 pleton, yayasan budi luhur 5 personil dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Api dari kompor gas yang meledak.

<b>29</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Jumat / 21 Oktober 2022
Pukul	:	05.05 WIB
Lokasi	:	Jl. Kelapa Gading Ujung, Rt. 12 Kelurahan Tungkai Harapan Kecamatan Tungkai Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Rt. 12 Kelurahan Tungkai Harapan terjadi di rumah Bapak Alo. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat disebabkan adanya percikan api dari instalasi listrik yang langsung menyambar bagian rumah yang terbuat dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah karena angin dan sarana untuk pemadaman yang seadanya. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah milik Bapak Alo habis terbakar dengan jumlah total kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,-

Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar, satpol pp, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam dari damkar
Personil yang turun	:	Damkar 1 pleton, satpol pp 1 pleton dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Konsleting listrik dari instalasi rumah

<b>30</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL III</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 24 Oktober 2022
Pukul	:	09.05 WIB
Lokasi	:	Jl. Panglima Ujung Rt. 03 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. Panglima Ujung Rt. 03 Kelurahan Tungkal III terjadi di rumah di 4 (empat) rumah habis terbakar dan 1 (satu) rumah rusak berat. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat membakar bagian rumah yang terbuat dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan dibantu oleh petugas damkar kabupaten, satpol pp dan satlinmas kelurahan dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam dilanjutkan proses pendinginan dan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	5 (lima) rumah terdampak dengan 4 (empat) habis terbakar dan 1 (satu) rusak berat dengan jumlah total kerugian kurang belum dapat diperkirakan sampai laporan ini dibuat.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar, satpol pp, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam dari damkar
Personil yang turun	:	Damkar 1 pleton, satpol pp 1 pleton dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.

<b>31</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Kamis / 27 Oktober 2022
Pukul	:	23.00 WIB
Lokasi	:	Jl. A. Yani Rt. 01 dan Lrg. Dahlia Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. A. Yani Rt. 01 dan Lrg. Dahlia Kelurahan Tungkal IV Kota terjadi dengan menghabiskan 13 (tiga belas)

		<p>rumah/bangunan dengan nama nama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atong</li> <li>2. Ahui</li> <li>3. Asek</li> <li>4. kunghui</li> <li>5. Alex</li> <li>6. Aseng</li> <li>7. Ati</li> <li>8. Amang</li> <li>9. Samsiah</li> <li>10. Nurhayati</li> <li>11. Eko</li> <li>12. Steven</li> <li>13. H. Yani</li> </ol> <p>Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat menyambar bagian rumah yang terbuat dari kayu. Waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam dan dilanjutkan dengan proses pendinginan dan penyisiran lokasi kejadian.</p>
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	8 (delapan) ruko habis terbakar, 2 (dua) unit ruko rusak ringan dan 3 (tiga) rumah rusak berat dengan jumlah total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar, yayasan budi luhur, satpol pp, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam dari damkar, 1 unit dari yayasan budi luhur
Personil yang turun	:	Damkar 1 pleton, satpol pp 1 pleton, yayasan budi luhur 5 personil dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.

<b>32</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL III</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 04 Desember 2022
Pukul	:	06.10 WIB
Lokasi	:	Jl. Panglima Rt. 21 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran di Jl. Panglima Rt. 21 Kelurahan Tungkal III terjadi di rumah Bapak Syarifuddin, Bapak H. Ridwan dan Bapak Darwis. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat yang langsung menyambar bagian rumah yang terbuat

		dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan dibantu oleh petugas damkar kabupaten, satpol pp dan satlinmas kelurahan dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam dilanjutkan proses pendinginan dan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	2 (dua) rumah habis terbakar dan 1 (satu) bedeng habis terbakar dengan jumlah total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar, satpol pp, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam dari damkar
Personil yang turun	:	Damkar 1 pleton, satpol pp 1 pleton dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.

<b>33</b>	<b>KEBAKARAN DI DUSUN MULYA DESA KARYA MAJU</b>	
Hari / Tanggal	:	Rabu / 07 Desember 2022
Pukul	:	13.30 WIB
Lokasi	:	RT. 06 Dusun Mulya Desa Karya Maju Kecamatan Pengabuan.
Kronologis	:	Kebakaran di RT. 06 Dusun Mulya Desa Karya Maju terjadi di rumah Bapak Jali. Menurut laporan dari warga kejadian kebakaran tersebut terjadi dengan cepat yang langsung menyambar bagian rumah yang terbuat dari kayu. Warga secara bersama sama memadamkan api dengan dibantu oleh petugas damkar kecamatan, satpol pp kecamatan dan satlinmas kelurahan dengan mengambil air dari parit yang ada di dekat lokasi kejadian. Api dengan cepat membakar semua isi rumah waktu proses pemadaman kurang lebih dua jam dilanjutkan proses pendinginan dan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	1 (satu) orang meninggal dunia atas nama siti badriah.
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan jumlah total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh anggota damkar kecamatan, satpol pp kecamatan, satlinmas desa kelurahan dan warga setempat dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam dari damkar
Personil yang turun	:	Damkar 1 regu, satpol pp 3 orang dan warga setempat.
Penyebab kebakaran	:	Masih dalam proses penyelidikan sampai laporan ini dibuat.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

**KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT**

**OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TUGAS :** Membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**FUNGSI :**

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang Berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$	Hasil Laporan Bidang Trantibum serta Linmas
			2. Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Yang diadukan}} \times 100 \%$	Hasil Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Kuala Tungkal, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**LYRA H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 198512 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./ Fax ( 0742 ) 22523

E-Mail polpp\_tungkal@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, **JANUARI** 2022

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

**Pihak Pertama,**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Sakip	B
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	80 %

**Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Anggaran**

Rp. 4.647.297.577  
Rp. 4.318.839.617

**JUMLAH**

**Rp. 8.966.137.194**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

**KABUPATEN** : **TANJUNG JABUNG BARAT**

**OPD** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TUGAS** : Membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

**FUNGSI** :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang Berhak mendapat layanan}} \times 100 \%$	Hasil Laporan Bidang Trantibum serta Linmas
			2. Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Yang diadukan}} \times 100 \%$	Hasil Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Kuala Tungkal, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

  
**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650619 198512 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./ Fax ( 0742 ) 22523

E-Mail polpp\_tungkal@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, JANUARI 2022

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

**Pihak Pertama,**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat Sakip	B
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	80 %

**Program**

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Anggaran**

Rp. 4.647.297.577  
Rp. 4.318.839.617

**JUMLAH**

**Rp. 8.966.137.194**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	2 Laporan
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjP/ LAKIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6 Laporan
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
5	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Laporan
6	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3Dokumen
7	Menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	1 Laporan
8	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah terkait	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
9	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	1 Laporan
10	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan kab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	1 Laporan
11	Melaporkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan sesuai MCP KPK ( Perangkat Daerah Terkait)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Dokumen kepatuhan tindakan juthasil monitoring dan evaluasi MCP KPK.	1 Dokumen
11	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	12 Laporan
12	Menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Laporan Penegakan Perdadan Perkada - Laporan Penyelenggaraan Tibumdan Tranmas - Laporan Penyelenggaraan Linmas	1 Dokumen

Kuala Tungkal, JANUARI 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

**CASCADING SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran Strategis RPJMD, Sasaran Strategis OPD Program dan Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (satuan)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	Eselon
	<b>MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100%	8.966.137.194	KEPALA SATUAN	II
			Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	80%			
A1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Satpol	Predikat Sakip	B	4.647.297.577	KEPALA SATUAN	II
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Birokrasi	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%	6.102.960	Sekretaris	III
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Terbitnya Lakip SKPD	20 Laporan	6.102.960	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program	IV
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Birokrasi	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%	4.188.128.913	Sekretaris	III
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	34 Orang	4.072.628.913	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	14 Orang	115.500.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Birokrasi	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%	250.557.004	Sekretaris	III
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 bulan	2.733.885	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	36.569.597	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersediannya makanan dan minuman rapat	12 bulan	46.575.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersediannya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	10.464.672	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	12 bulan	6.600.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	147.613.850	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Birokrasi	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran dan sarana prasarana aparatur	100%	54.457.000	Sekretaris	III
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersedianya administarsi Surat-Menyurat	314 Lmbr	2.737.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	16.920.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV



No	Sasaran Strategis RPJMD, Sasaran Strategis OPD Program dan Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (satuan)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	Eselon
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	34.800.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
5.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Birokrasi</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran dan sarana prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>148.051.700</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>III</b>
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Prasarana	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	11 Unit	80.078.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Prasarana	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan tersedia nya Pajak Kendaraan	2 Unit	43.693.700	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Prasarana	Peralatan Dalam Kondisi baik	7 Unit	4.670.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan Prasarana	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	1 Gedung	19.610.000	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV
<b>B1</b>	<b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok</b>	<b>Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan</b>	<b>80%</b>	<b>4.318.839.617</b>	<b>KEPALA SATUAN</b>	<b>II</b>
1.	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>Cakupan penanganan gangguan trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>4.318.839.617</b>	<b>Kabid Penegakan Perda dan Perkada, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Kabid Perlindungan Masyarakat</b>	<b>III</b>
1.1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	4 Kegiatan	4.318.839.617	Kabid Penegakan Perda dan Perkada, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Kabid Perlindungan Masyarakat	III

Kuala Tungkal, Februari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

  
D. H. ENRANG SURYA, MM

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650619 198512 1 001



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan arahan dan masukan dari evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakup) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada acara pendampingan dan asistensi SAKIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Jakarta Tahun 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Istansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1570 Tahun 2021);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

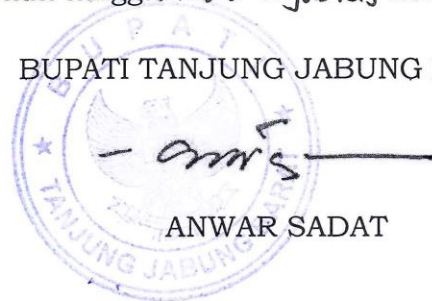
- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:



- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal : 22 Agustus 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18

After

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2022  
 TENTANG:  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang / Urusan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p>	Pendidikan, Bag. Kesejahteraan Rakyat-Setda, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Tenaga Kerja, Kepemudaan Dan Olahraga, kepegawaian
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	2. Indeks Ketentraman	$IK = \frac{\text{Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100\%$	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa Dan Politik, Sosial
3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Komponen Pengungkit + Komponen Hasil	Pengawasan, Perencanaan, Bag. Organisasi-Setda., Keuangan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	4. Nilai SAKIP Kabupaten	30% (perencanaan) + 30% (pengukuran) + 15% (pelaporan) + 25% (evaluasi)	Pengawasan, Perencanaan, Bag. Organisasi-Setda.

5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Penanaman Modal, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Keuangan, Kesehatan
6	Meningkatnya kinerja pengeanggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah	6. Nilai Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil penilaian BPKP perwakilan Provinsi Jambi	Keuangan
7	Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan	7. Laju pertumbuhan ekonomi	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perhuibungan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal , Perikanan, Kepemudaan Dan Olahraga, Pertanian, Bag. Ekonomi - Setda
8	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA+IPU+ITH}{3}$	Lingkungan Hidup, kesehatan
9	Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota	9. Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <i>f<sub>i</sub></i> =Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i. <i>Y<sub>i</sub></i> =Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Perhubungan
		10. Indeks Infrastruktur	$II = (25\% \times \text{RT akses air bersih}) + (25\% \times \text{RT akses sanitasi}) + (25\% \times \text{RT akses listrik}) + (25\% \times \text{RT akses telepon})$	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kominfo, dan Bag.SDA-SETDA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

  
ANWAR SADAT



**DAFTAR REKAPITULASI PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
YANG DIBIYAI DANA APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT T.A. 2022  
POSISI : BULAN Desember 2022**

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %		
						Rp.	%				
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>											
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>5,234,294,111</b>	<b>5,127,727,977</b>	<b>106,566,134</b>	<b>4,244,451,720</b>	<b>81.09</b>	<b>97</b>	<b>0.17</b>	<b>16.1</b>	<b>989,842,391</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SRI NURBAITI, SE	6,102,960	6,102,960	0	6,084,896	99.7	100	0.0002	0.02	18,064
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SRI NURBAITI, SE	4,072,629,026	4,072,628,913	113	3,219,643,019	79.06	94.569	0.1295	12.25	852,986,007
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI NURBAITI, SE	115,500,000	115,500,000	0	107,250,000	92.86	100	0.0037	0.37	8,250,000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI NURBAITI, SE	42,548,718	36,569,597	5,979,121	42,410,120	99.67	100	0.0014	0.14	138,598
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SRI NURBAITI, SE	46,575,000	46,575,000	0	38,400,000	82.45	100	0.0015	0.15	8,175,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SRI NURBAITI, SE	10,464,672	10,464,672	0	5,804,672	55.47	100	0.0003	0.03	4,660,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SRI NURBAITI, SE	6,600,000	6,600,000	0	5,130,000	77.73	100	0.0002	0.02	1,470,000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SRI NURBAITI, SE	192,884,300	147,613,850	45,270,450	130,158,921	67.48	100	0.0061	0.61	62,725,379
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SRI NURBAITI, SE	2,725,000	2,737,000	-12,000	2,559,200	93.92	100	0.0001	0.01	165,800
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SRI NURBAITI, SE	16,920,000	16,920,000	0	12,039,807	71.16	95.745	0.0005	0.05	4,880,193
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SRI NURBAITI, SE	34,800,000	34,800,000	0	22,800,000	65.52	65.518	0.0011	0.07	12,000,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI NURBAITI, SE	122,992,350	80,078,000	42,914,350	105,708,500	85.95	100.001	0.0039	0.39	17,283,850
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SRI NURBAITI, SE	52,737,800	43,693,700	9,044,100	39,335,000	74.59	100	0.0017	0.17	13,402,800

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %		
						Rp.	%				
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI NURBAITI, SE	8,040,000	4,670,000	3,370,000	6,290,000	78.23	84.826	0.0003	0.02	1,750,000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SRI NURBAITI, SE	19,610,000	19,610,000	0	18,589,600	94.8	100	0.0006	0.06	1,020,400
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SRI NURBAITI, SE	2,733,885	2,733,885	0	2,733,885	100	100	0.0001	0.01	0
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SRI NURBAITI, SE	197,730,400	197,730,400	0	196,814,100	99.54	100	0.0063	0.63	916,300
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI NURBAITI, SE	282,700,000	282,700,000	0	282,700,000	100	100	0.009	0.9	0
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>4,231,323,583</b>	<b>4,435,377,843</b>	<b>-204,054,260</b>	<b>4,142,694,057</b>	<b>97.91</b>	<b>91</b>	<b>0.13</b>	<b>12.31</b>	<b>88,629,526</b>
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	BUKRAN HADINATA, SE	4,111,789,051	4,315,843,311	-204,054,260	4,051,214,151	98.53	99.998	0.1307	13.07	60,574,900
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	BUDI ARYANTO S, SE	7,320,000	7,320,000	0	5,120,000	69.95	100	0.0002	0.02	2,200,000
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	BUDI ARYANTO S, SE	15,017,536	15,017,536	0	13,267,536	88.35	89.766	0.0005	0.04	1,750,000
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	BUKRAN HADINATA, SE	36,621,384	36,621,384	0	27,296,384	74.54	77.39	0.0012	0.09	9,325,000
5	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	AGUSUSIAWAN, S.Pd	18,626,012	18,626,012	0	16,288,486	87.45	91.944	0.0006	0.05	2,337,526
6	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	AGUSUSIAWAN, S.Pd	41,949,600	41,949,600	0	29,507,500	70.34	89.8	0.0013	0.12	12,442,100
<b>2 Program dan 24 Sub Kegiatan</b>			<b>9,465,617,694</b>	<b>9,563,105,820</b>	<b>-97,488,126</b>	<b>8,387,145,777</b>	<b>88.61</b>	<b>94</b>	<b>0.3</b>	<b>28.41</b>	<b>1,078,471,917</b>

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196506191985121001

Bendaharawan Pengeluaran  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Z. MUTTAQIN**

NIP. 19820515 200701 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.182, Kuala Tungkal Kode Pos. 36513  
 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

Kuala Tungkal, 14 Februari 2023.

Nomor : 000.8/357 / Org.  
 Sifat : Penting.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  
 Tahun 2022.

Kepada  
 Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
 Kab. Tanjung Jabung Barat

di -  
 Tempat.

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berkenaan dengan dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan teknik pengisian kuesioner dan wawancara pada Tahun 2022.
2. Dari hasil SKM pada 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh nilai SKM masing – masing Perangkat Daerah dengan kriteria SANGAT BAIK, BAIK dan KURANG BAIK..
3. Terkait angka 2 (dua) di atas, bersama ini terlampir disampaikan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Nilai Rata-Rata (NRR) per unsur pelayanan pada Instansi Saudara dan untuk ditindak lanjuti sehingga diharapkan kedepan pelayanan yang diberikan semakin baik dan meningkat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si  
 Pembina Utama Madya  
 Nip. 19680817 199203 1 007

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal ( sebagai laporan ).
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal ( sebagai laporan ).
3. Arsip.

### 31. Satuan Polisi Pamong Praja

#### a. Deskripsi Responden

Rekap pengisian formulir secara online dan offline survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan terdapat sebanyak 10 responden yang sudah mengisi formulir tersebut, yang terdiri dari 6 responden laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian dilihat latar belakang pendidikan responden yang mengisi formulir tersebut, terdiri dari diantaranya, 5 orang SMA, dan 1 orang SMP dan 4 Sarjana (S.1). Kalau dari aspek pekerjaan responden terdapat 4 profesi diantaranya, 3 PNS, 1 Swasta, 4 Orang wirausaha dan 2 Orang lainnya, sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 154. Responden Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan jenis kelamin

Unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
		6	4	10

Tabel 155. Responden Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pendidikan

Unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Pendidikan			Total
		SMP	SMA	S1	
		1	5	4	3

Tabel 156. Responden Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pekerjaan

Unit	Satuan Polisi Pamong Praja	Pekerjaan				Total
		PNS	SWASTA	Wirau-saha	LAIN-NYA	
		3	1	4	2	10

#### b. Evaluasi Unsur

Berdasarkan hasil survei evaluasi unsur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan U1-2, U4-5, U7-9 yang berkaitan dengan Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, biaya/ tarif, jenis pe-



layanan, perilaku SDM, Sarana Prasarana mendapat respons “Sangat Baik”. Sedangkan pertanyaan U3 (Waktu penyelesaian) dan U6 Kompetensi pelaksana mendapat respon “Baik”.

Tabel 157. Evaluasi unsur SKM Satuan Polisi Pamong Praja

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR x 25	Keterangan
U1	Persyaratan	3,90	97,50	Sangat Baik
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,60	90,00	Sangat Baik
U3	Waktu penyelesaian	3,40	85,00	Baik
U4	Biaya/ tarif	3,90	97,50	Sangat Baik
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,70	92,50	Sangat Baik
U6	Kompetensi pelaksana	3,50	87,50	Baik
U7	Perilaku pelaksana	3,70	92,50	Sangat Baik
U8	Sarana dan prasarana	3,60	90,00	Sangat Baik
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,90	97,50	Sangat Baik

Kesimpulan uraian dan tabel di atas, merekomendasikan kepada Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tersebut untuk dapat mempertahankan pelayanan publiknya yang berkaitan dengan Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur,, biaya/ tarif, jenis pelayanan, perilaku SDM, Sarana Prasarana mendapat respons “Sangat Baik”. Sedangkan pertanyaan U3 (Waktu penyelesaian) dan U6 Kompetensi pelaksana mendapat respon “Baik”. supaya dapat ditingkatkan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil akumulasi Nilai Rata-rata (NRR) Tertimbang dan Nilai Indeks pelayanan publik di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdapat sebesar 3,65, kemudian setelah konversi ke nilai indeks menjadi 91,30 (Sangat Baik). Jadi berdasarkan nilai tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum pelayanan publik di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam katagori “Sangat Baik”, karena rata-rata unsur pelayanan

publiknya mendapat respon “Sangat Baik”, pertanyaan U1-2, U4-5, U7-9 yang berkaitan dengan Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur,, biaya/ tarif, jenis pelayanan, perilaku SDM, Sarana Prasarana. Sedangkan pertanyaan U3 (Waktu penyelesaian) dan U6 Kompetensi pelaksana mendapat respon “Baik”, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 158. IKM Satuan Polisi Pamong Praja

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,90	0,43
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,60	0,40
U3	Waktu penyelesaian	3,40	0,37
U4	Biaya/ tarif	3,90	0,43
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,70	0,41
U6	Kompetensi pelaksana	3,50	0,39
U7	Perilaku pelaksana	3,70	0,41
U8	Sarana dan prasarana	3,60	0,40
U9	Pengaduan, saran dan masukan	3,90	0,43
Nilai Indeks (NI)			3,65
Nilai Indeks setelah konversi (NI x 25)			91,30
Kinerja Unit Pelayanan			Sangat Baik





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mukhtar Hadi, A.Md**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhammad Firdaus Indra,SE**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2022

Pihak Kedua

**Muhammad Firdaus Indra,SE**

Pihak Pertama,

**Mukhtar Hadi, A.Md**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM**  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Manajemen Pelaporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan	Terbitnya Lakip SKPD	3 Dokument
		Jumlah Dokument Perencanaan	5 Dokument
		Jumlah Dokument RKA yang Dikerjakan	2 Dokument
		Jumlah Dokument RKA Perubahan Yang Dikerjakan	2 Dokument
		Jumlah Laporan Kinerja Yang Dikerjakan	4 Laporan
		Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja	4 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6.102.960
	<b>Total</b>	<b>6.102.960</b>

Kuala Tungkal, 2022

Sekretaris  
Satuan Polisi Pamong Praja



**Muhammad Firdaus Indra, SE**  
Nip. 19780928 200604 1 014

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
Program Satuan Polisi Pamong Praja



**Mukhtar Hadi, A.Md**  
Nip. 19800212 200604 1 014



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Firdaus Indra,SE**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tunggal,

2022

**Pihak Kedua**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**Pihak Pertama,**

**Muhammad Firdaus Indra,SE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**SEKRETARIS**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.102.960
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.188.128.913
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.557.004
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.457.000
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.051.700
<b>Total</b>		<b>4.647.297.577</b>

Kuala Tungkal,

2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. Endang Surya, MM**  
Nip. 19650619 198512 1 001

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab. Tanjung Jabung Barat



**Muhammad Firdaus Indra, SE**  
Nip. 19780928 200604 1 014



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bukran Hadinata,SE**  
Jabatan : Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**Pihak Pertama,**

**Bukran Hadinata,SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**KABID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Perkada)	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.318.839.617
	<b>Total</b>	<b>4.318.839.617</b>

Kuala Tungkal, 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab. Tanjung Jabung Barat

  
**Drs. H. Endang Surya, MM**  
Nip. 19650619 198512 1 001

Kasi Operasional dan Pengendalian  
Satuan Polisi Pamong Praja

  
**Bukran Hadinata, SE**  
Nip. 19660709 198603 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agususiawan, SPd**  
Jabatan : Kabid. Penegakan Perda dan Perkada  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**Pihak Pertama,**

**Agususiawan, SPd**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KABID PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup	80 %
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	336.175.466
	<b>Total</b>	<b>336.175.466</b>

Kuala Tungkal, 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. Endang Surya, MM**  
Nip. 19650619 198512 1 001

Kabid. Penegakan Perda dan Perkada  
Satuan Polisi Pamong Praja



**Agususiawan, SPd**  
Nip. 19680806 198903 1 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Wahyu Utomo, S.AP**  
Jabatan : Kasi Hubungan Antar Lembaga  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agususiawan, SPd**  
Jabatan : Kabid. Penegakan Perda dan Perkada  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

  
**Agususiawan, SPd**

**Pihak Pertama,**

  
**Eko Wahyu Utomo, S.AP**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga dan Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama Antar Lembaga dan Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Perkada	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	99.999.000
	<b>Total</b>	<b>99.999.000</b>

Kuala Tungkal, 2022

Kabid. Penegakan Perda dan  
Perkada Satuan Polisi Pamong Praja



**Agususiawan, SPd**  
Nip. 19680806 198903 1 005

Kasi Hubungan Antar Lembaga  
Satuan Polisi Pamong Praja



**Eko Wahyu Utomo, S.AP**  
Nip. 19730922 199602 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Harapan Simanulang**

Jabatan : Kasi Penegakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agususiawan, SPd**

Jabatan : Kabid. Penegakan Perda dan Perkada

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2022

**Pihak Kedua,**

  
**Agususiawan, SPd**

**Pihak Pertama,**

  
**Harapan Simanulang**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI PENEGAKAN**  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhnya Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang termonitor dan Terevaluasi	80 %
		Persentase Peningkatan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	236.176.466
	<b>Total</b>	<b>236.176.466</b>

Kuala Tungkal, 2022

Kabid. Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja

  
Agususiawan, SPd  
 Nip. 19680806 198903 1 005

Kasi Penegakan  
Satuan Polisi Pamong Praja

  
Harapan Simanulang  
 Nip. 19640928 198608 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Elvian Sahrudi, S.Kom.I**  
Jabatan : Kasi Penyelidikan dan Penyidikan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agususiawan, SPd**  
Jabatan : Kabid. Penegakan Perda dan Perkada  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

  
**Agususiawan, SPd**

**Pihak Pertama**

  
**Elvian Sahrudi, S.Kom.I**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengamanan, Pengendalian Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditanganin	100 %

Kuala Tungkal, 2022

Kabid. Penegakan Perda dan  
Perkada Satuan Polisi Pamong Praja



**Agususiawan, SPd**  
Nip. 19680806 198903 1 005

Kasi Hubungan Antar Lembaga  
Satuan Polisi Pamong Praja



**Elvian Sahrudi, S.Kom.I**  
Nip. 19791210 200701 1 016



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Aryanto.S, SE**  
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. Endang Surya, MM**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tunggal, 2022

**Pihak Kedua,**

**Drs. H. Endang Surya, MM**

**Pihak Pertama,**

**Budi Aryanto. S, SE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Persentase Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	331.314.151
	<b>Total</b>	<b>331.314.151</b>

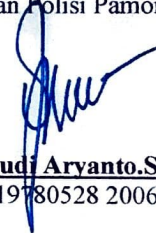
Kuala Tungkal, 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**Drs. H. Endang Surya, MM**  
Nip. 19650619 198512 1 001

Kabid. Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja



**Budi Aryanto.S, SE**  
Nip. 19780528 200604 1 016



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syamsul Bahri**  
Jabatan : Kasi Pelatihan dan Mobilisasi  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Budi Aryanto.S, SE**  
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

**BUDI ARYANTO. S, SE**

**Pihak Pertama,**

**SYAMSUL BAHRI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI PELATIHAN DAN MOBILISASI**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Linmas	Terlaksannya Pelatihan, Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Linmas	100 %

Kuala Tungkal, 2022

Kabid Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja



**BUDI ARYANTO, S. SE**  
Nip. 19780528 200604 1 016

Kasi Pelatihan dan Mobilisasi  
Satuan Polisi Pamong Praja



**SYAMSUL BAHRI**  
Nip. 19640419 198903 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Desi Dian Sari, SH**  
Jabatan : Kasi Kewaspadaan Dini  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Budi Aryanto.S, SE**  
Jabatan : Kabid Perlindungan Masyarakat  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

Pihak Kedua

**BUDI ARYANTO. S, SE**

Pihak Pertama,

**DESI DIAN SARI, SH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI KEWASPADAAN DINI**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan kondusif.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sat linmas	100 %

Kabid Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja



**BUDI ARYANTO.S, SE**  
Nip. 19780524 200604 1 016

Kuala Tungkal, 2022

Kasi Kewaspadaan Dini  
Satuan Polisi Pamong Praja



**DESI DIAN SARI, SH**  
Nip. 19811225 200604 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Gunawan,S.STP,MM**

Jabatan : Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Bukran Hadinata,SE**

Jabatan : Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2022

**Pihak Kedua,**

**Bukran Hadinata,SE**

**Pihak Pertama,**

**Rudi Gunawan,S.STP, MM**


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
**KASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengamanan, Pengendalian Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat	Terlaksannya kegiatan pengamanan, Pengendalian Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
	<b>Total</b>	<b>25.000.000</b>

Kuala Tungkal, 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab. Tanjung Jabung Barat  
( Pihak Kedua )



**Bukran Hadinata,SE**  
Nip. 19660709 198603 1 002

Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja  
( Pihak Pertama )



**Rudi Gunawan,S.STP,MM**  
Nip. 19910915 201406 1 002